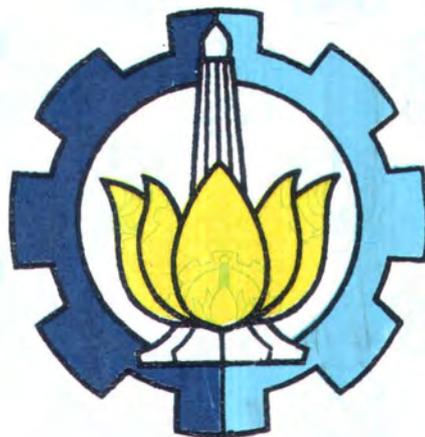


2005/H/06



**TUGAS AKHIR**  
**LL 1327**

**MANAJEMEN SUMBER DAYA PESISIR SEKTOR  
PARIWISATA DI KABUPATEN PACITAN, JAWA TIMUR**



RSKe  
627.58  
Sul  
m-1  

---

2006

**OLEH :**

**SONY SULISTYAWAN**  
**4301 100 031**

<b>PERPUSTAKAAN ITS</b>	
<b>Tgl. Terima</b>	2 - 07 - 06
<b>Terima Dari</b>	H
<b>No. Agenda Prp.</b>	225660

**JURUSAN TEKNIK KELAUTAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI KELAUTAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
SURABAYA  
2006**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**MANAJEMEN SUMBER DAYA PESISIR SEKTOR  
PARIWISATA DI KABUPATEN PACITAN, JAWA TIMUR**



**SONY SULISTYAWAN**  
**4301 100 031**

Surabaya, 28 Juli 2006.

**Mengetahui/Menyetujui**

**Pembimbing**



**Dr. Mahmud Musta'in, M.Sc**  
**131.869.967**

**Ketua Jurusan Teknik Kelautan**



**Ir. IMAM ROCHANI, M.Sc**  
**NIP. 131 417 209**

## ABSTRAK

Sony Sulistyawan<sup>1</sup>  
Mahmud Musta'in<sup>2</sup>

Penelitian ini merupakan studi tentang Manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kabupaten pacitan. Dengan lokasi penelitian di daerah pesisir Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Jawa Timur, tepatnya kawasan wisata pantai Teleng Ria Kabupaten Pacitan. Proses penentuan analisa Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan menggunakan metode *Analityc Hierarchy Process* (AHP) dengan bantuan *softwere Expert Choice Vession 9.0*. Hasil dari metode AHP berupa vektor prioritas (*eigen vector*) dari pelaku yaitu Masyarakat (0.288), Pemerintah Daerah (0.446), dan Investor (0.266). Berdasarkan persepsi *stakeholder* Kabupaten Pacitan untuk Manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kabupaten pacitan menjadi tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah. Vektor prioritas bidang untuk pelaku masyarakat adalah Lingkungan (0.353), Ekonomi (0.315), Sosial (0.185) dan Hukum (0.146). Untuk pelaku pemerintah daerah adalah Lingkungan (0.283), Hukum (0.250), Sosial (0.239) dan Ekonomi (0.228). Dan untuk pelaku investor adalah Hukum (0.333), Lingkungan (0.353), Ekonomi (0.233) dan Sosial (0.181). Serta prioritas alternatif kebijakan Manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kabupaten pacitan yaitu: Pembinaan dan Kerjasama dengan Masyarakat (0.314), Pengelolaan Pariwisata yang Terarah (0.264), Rehabilitasi dan Konservasi pesisir (0.239) serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata (0.183). Pada Metode AHP nilai rasio konsistensi (CR) yang didapat harus 10% atau kurang, yang menunjukkan konsistensinya baik.

Kata Kunci: Manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata , AHP, vektor prioritas.

## ABSTRACT

Sony Sulistyawan<sup>1</sup>  
Mahmud Musta'in<sup>2</sup>

This research studies about Resource Management of Costal Area Tourism Sector in Regency of Pacitan, East Java. The location this research is in district of Pacitan of Regency of Pacitan, East Java, Exactly the area of Teleng Ria beach, Pacitan. Method that is used for the analysis of resource management is AHP constructively software of Expert Choice Ver 9.0. The result from AHP method is eigen vector from Social humanity (0.288), Local Government (0.466), and Investor (0.266). Stakeholder perception that resource management of tourism sector in Regency of Pacitan is a government responsibility. The alternative priority of resource management of tourism sector in Regency of Pacitan is construction And Cooperation with the Society ( 0.314), Directional Tourism Management ( 0.264), Rehabilitating and costal area Conservation ( 0.239) and the increasing of tourism facility (0.183). From this AHP method, the consistency ratio must be 10% or less, for the best consistency.

Key word : Management Resource of Costal Area Tourism Sector, AHP, Vector priority

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir sebagai salah satu persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan kuliah di Jurusan Teknik Kelautan FTK-ITS.

Dalam pembuatan laporan tugas akhir ini penulis mendapatkan bimbingan yang begitu berarti dari beberapa pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis terutama kepada :

1. Ayahanda Abu Mansur Solikin dan Ibunda Yeni Sulistyowati yang selalu memberikan doa, dukungan dan bantuannya baik secara moril maupun materiil.
2. Yang terhormat Bapak Ir. H. Imam Rochani, M.Sc selaku ketua jurusan Teknik Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Ir. Handayanu, M.Sc selaku sekretaris jurusan Teknik Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
4. Yang terhormat Bapak Dr. Mahmud Musta'in, M.Sc selaku dosen pembimbing yang memberikan kesempatan mengambil judul tugas akhir serta segala masukan dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Yang terhormat Bapak Dr. Ir. Wisnu Wardhana, M.Sc selaku dosen wali.
6. Yang terhormat Bapak Drs. Priyo Agus Triwibowo selaku sekretaris Kecamatan Pacitan yang telah memberikan masukan dan kemudahan dalam melaksanakan survei di Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.
7. Mas Nanang, Mas Dodik, Mbak Ririn, Mbak Siska, Adikku Stevi serta Reza and Rendra yang telah memberikan doa, dukungan, bantuan dan motifasi dalam pengerjaan tugas akhir ini.
8. My Special Girl "Icha" yang telah memberi bantuan, doa, motivasi dan semangat dalam tugas akhir ini.
9. Ervan(L-18) dan Ruri(L-18), trimakasih atas bantuan dan pemikirannya dalam penyelesaian tugas akhir ini.
10. Anak-anak kontrakan 2001(L-19) dan keluarga besar Albatroz yang telah memberikan dukungan serta semangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.

11. Obek atas bantuan surveinya dan Uyab atas pemikirannya serta Keluarga besar PLO Madiun yang telah memberi semangat dalam tugas akhir ini.
12. Masyarakat Pesisir Kabupaten Pacitan dan Instansi yang terkait, terima kasih atas kerjasamanya.

Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun, sehingga dapat penulis jadikan sebagai pedoman dalam mengerjakan tugas-tugas selanjutnya.

Semoga Allah SWT melimpahkan balasan pahala kepada semua pihak yang telah membantu penulisan laporan ini.

Penulis

# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Batasan Masalah	3
1.6 Sistematika Penulisan	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	5
2.1 Pengertian Wilayah pesisir	5
2.2 Potensi Wilayah Pesisir	6
2.3 Permasalahan Wilayah Pesisir	7
2.4 Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu	8
2.5 Pengolahan Kuisisioner	8
2.5.1 Perhitungan Besarnya Sampel	8
2.5.2 Perhitungan Rata-Rata Geometrik	10
2.6. Metode <i>Analytic Hierarchy Process</i> (AHP)	11
2.6.1 Metode <i>Analytic Hierarchy Process</i> (AHP)	12
2.6.2 Tahap-Tahap Penyusunan Hirarki	13
2.6.3 Formulasi Matematis pada Model <i>Analytic Hierarchy Process</i>	14
2.6.4 Perhitungan Indeks Konsistensi	16
2.6.5 Perhitungan Rasio Konsistensi	17

2.7	<i>Expert Choice Professional</i>	17
2.8	Model Hirarki Rencana Manajemen Sumber Daya Wilayah Pesisir, Studi Kasus di Kabupaten Pacitan	19
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	21
<b>BAB IV</b>	<b>KONDISI DAERAH STUDI</b>	25
4.1	Potensi Kawasan Pesisir dan Laut	27
4.2	Karakteristik Kependudukan	28
4.2.1	Struktur Sosial Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk	28
4.2.2	Sosial Budaya Masyarakat	28
4.3	Karakteristik Perekonomian	29
4.3.1	Sektor Pertanian Tanaman Pangan	29
4.3.2	Sektor Perkebunan	29
4.3.3	Sektor Peternakan	29
4.3.4	Sektor Kelautan dan Perikanan	30
	a. Kondisi Masyarakat Nelayan	30
	b. Kondisi Sarana dan Prasarana	30
4.3.5	Sektor Industri	32
4.3.6	Sektor Perdagangan	32
4.3.7	Sektor Pariwisata	32
4.4	Karakteristik Pelayanan Sosial Ekonomi	33
4.4.1	Pemerintahan dan Pelayanan Umum	33
4.4.2	Pendidikan	34
4.4.3	Kesehatan	34
4.4.4	Perdagangan dan Jasa	34
4.4.5	Peribadatan	35
<b>BAB V</b>	<b>ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN</b>	36
5.1	Prioritas Rencana Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan	36
5.1.1	Teknik pengambilan sampel dan Metode pengambilan rata-rata geometrik	36
5.1.2	Tujuan Rencana Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata	37
5.1.3	Pelaku Pengelolaan	37
5.1.4	Bidang Rencana Pengelolaan	39

5.1.5 Aspek Pengelolaan	40
5.1.6 Alternatif Rencana Pengelolaan	43
5.1.7 Penentuan Alternatif Menurut Pelaku Masyarakat	52
5.1.8 Penentuan Alternatif Menurut Pelaku Pemerintah Daerah	53
5.1.9 Penentuan Alternatif Menurut Pelaku Investor/Swasta	54
5.2 Analisis Sensitivitas Rencana Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan	55
5.3 Pembahasan	56
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>58</b>
6.1 Kesimpulan	58
6.2 Saran	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Derajat Konfidensi	9
Tabel 2.2 Skala Dasar	12
Tabel 2.3 Indeks Random untuk Tiap Orde Matrik	17
Tabel 4.1 Obyek Wisata Pada Kawasan Pesisir Di kabupaten Pacitan	33
Tabel 5.1 Nilai Perbandingan Berpasangan antara Pelaku Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan	37
Tabel 5.2 Vektor Prioritas dan <i>Consistency Ratio</i> dari Pelaku Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan	38
Tabel 5.3 Vektor Prioritas Kriteria Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan dan <i>Consistency Ratio</i>	39
Tabel 5.4 Vektor Prioritas Aspek Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan dan <i>Consistency Ratio</i> Berdasarkan Bidang Hukum	40
Tabel 5.5 Vektor Prioritas Aspek Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan dan <i>Consistency Ratio</i> Berdasarkan Bidang Ekonomi	41
Tabel 5.6 Vektor Prioritas Aspek Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan dan <i>Consistency Ratio</i> Berdasarkan Bidang Lingkungan	42
Tabel 5.7 Vektor Prioritas Aspek Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan dan <i>Consistency Ratio</i> Berdasarkan Bidang Sosial	43
Tabel 5.8 Vektor Prioritas Alternatif Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan dan <i>Consistency Ratio</i> Berdasarkan Aspek Kebijakan Pemerintah	44
Tabel 5.9 Vektor Prioritas Alternatif Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan dan <i>Consistency Ratio</i> Berdasarkan Aspek Penegakan Hukum	45

Tabel 5.10 Vektor Prioritas Alternatif Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan dan <i>Consistency Ratio</i> Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat	46
Tabel 5.11 Vektor Prioritas Alternatif Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan dan <i>Consistency Ratio</i> Berdasarkan Aspek Peluang Investasi	47
Tabel 5.12 Vektor Prioritas Alternatif Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan dan <i>Consistency Ratio</i> Berdasarkan Aspek Ketersediaan Lahan	48
Tabel 5.13 Vektor Prioritas Alternatif Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan dan <i>Consistency Ratio</i> Berdasarkan Aspek Pencemaran dan Erosi	49
Tabel 5.14 Vektor Prioritas Alternatif Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan dan <i>Consistency Ratio</i> Berdasarkan Aspek Pendidikan	50
Tabel 5.15 Vektor Prioritas Alternatif Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan dan <i>Consistency Ratio</i> Berdasarkan Aspek Perilaku Masyarakat	51
Tabel 5.16 Jumlah Responden dan Hasil dari Pelaku Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan	56

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Definisi Wilayah Pesisir	5
Gambar 2.2 Model Hirarki Rencana Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.	20
Gambar 3.1 Diagram Alir Metodologi Penulisan	21
Gambar 3.2 Diagram Alir Metodologi <i>Analytic Hierarchy Process</i>	23
Gambar 4.1 Gambaran lokasi (Peta Lokasi)	25
Gambar 5.1 Model Hirarki Rencana Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan.	36
Gambar 5.2 Hirarki Penentuan Alternatif Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan Menurut Pelaku Masyarakat	52
Gambar 5.3 Hirarki Penentuan Alternatif Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan Menurut Pelaku Pemda	53
Gambar 5.4 Hirarki Penentuan Alternatif Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan Menurut Pelaku Investor	54
Gambar 5.5 Tampilan Analisis Sensitivitas	55

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Pacitan terletak di propinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah  $\pm 1.389,87 \text{ km}^2$ , dengan panjang garis pantai 70.709 km melalui 7 wilayah kecamatan yaitu kecamatan Sudimoro, Ngadirojo, Tulakan, Kebonagung, Pacitan, Pringkuku, dan Donorojo.

Wilayah pesisir Kabupaten Pacitan berbatasan langsung dengan pantai selatan Pulau Jawa, dengan karakteristik gelombang yang cukup besar rata-rata melebihi 1.5 m di tepi pantai, sedangkan karakteristik pantainya berpasir dari yang landai sampai curam. Lingkup perencanaan ruang kawasan pesisir dan laut untuk wilayah daratan meliputi  $951.03 \text{ km}^2$  ditambah wilayah lautan sejauh 4 mil dari batas pantai ( $\pm 523.82 \text{ km}^2$ ). Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Pacitan luas perairan laut untuk wilayah 12 mil dari batas pantai sebesar  $1571.44 \text{ km}^2$ . Sedangkan perairan (ZEEI) seluas  $26.190.62 \text{ km}^2$ .

Potensi sektor pariwisata di Kabupaten Pacitan mempunyai peluang yang cukup prospektif untuk dikembangkan menjadi industri pariwisata yang mampu bersaing dengan pariwisata di daerah lain bahkan mancanegara, ini cukup beralasan karena obyek wisata yang ada cukup beragam dan mempunyai ciri khusus dan nilai lebih dibanding dengan daerah lain. Potensi pariwisata di Kabupaten Pacitan meliputi wisata pantai, wisata goa, wisata budaya/religius, wisata rekreasi dan wisata industri.

Kabupaten Pacitan mempunyai obyek wisata yang sangat beragam, akan tetapi pembagian pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pacitan belum terlihat merata, khususnya untuk kawasan pesisir dimana untuk saat ini dalam pengelolaannya masih belum optimal, walaupun Pemerintah Kabupaten Pacitan sudah membangun fasilitas

dan infrastruktur yang ada di wilayah pesisir, antara lain pantai Teleng Ria tetapi pengelolaan yang ada masih belum terlihat nyata.

Dengan kondisi tersebut, maka diperlukan suatu bentuk metode pengelolaan sumber daya pesisir di Kabupaten Pacitan, terutama pada sumber daya pesisir sektor Pariwisata karena bidang tersebut terkait dengan kesejahteraan masyarakat pesisir secara langsung. Namun dalam proses pengelolaan dan pembangunan wilayah pesisir, pasti akan menimbulkan dampak terhadap sumber daya alam dan lingkungannya. Semakin tinggi intensitas pengelolaan dan pembangunan di wilayah pesisir, semakin tinggi pula pemanfaatan sumber daya alam dan perubahan lingkungan hidupnya. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan dan keterpaduan dalam pemanfaatan wilayah pesisir, maka diperlukan suatu rencana pengelolaan yang mempertimbangkan berbagai aspek. Untuk merencanakan pengelolaan pesisir dengan baik, maka masyarakat di sekitar pesisir dan instansi yang terkait (*stakeholders*) juga perlu dilibatkan di dalamnya.

Dalam penentuan prioritas program rencana pengelolaan pesisir di Pacitan, metode yang digunakan adalah *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Dengan metode AHP ini, beberapa kriteria dapat dilibatkan secara bersamaan dalam satu model hirarki. Di samping itu, masyarakat dan juga *stakeholders* dapat berperan serta dalam penentuan prioritas program rencana pengelolaan potensi pesisir dan laut yang ada.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Permasalahan utama dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah “Bagaimana prioritas rencana manajemen sumber daya pesisir sektor Pariwisata di Pantai Teleng Ria Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah untuk menentukan prioritas kebijakan di dalam rencana manajemen sumber daya pesisir sektor Pariwisata di Pantai Teleng Ria Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan



#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain:

1. Diketuainya konsep pengelolaan sumber daya pesisir sektor Pariwisata yang sesuai dengan kondisi wilayah pesisirnya serta dapat memberi suatu nilai tambah bagi masyarakat Kecamatan Pacitan dan sekitarnya.
2. Diketahui keadaan sebenarnya tentang kondisi lingkungan, sosial dan perekonomian masyarakat di daerah Pantai Teleng Ria Kabupaten Pacitan menurut persepsi pelaku (Hirarki Rencana).
3. Dari rencana hirarki tersebut diharapkan adanya perubahan sistem pengelolaan pariwisata yang lebih terarah sesuai dengan metode yang dipakai.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Agar permasalahan yang akan dipecahkan tidak terlalu meluas maka diperlukan batasan atau ruang lingkup penelitian, sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya yang dimaksud dalam Tugas Akhir ini adalah sumber daya sektor Pariwisata yang ada di Pantai Teleng Ria Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
2. Lokasi penelitian terletak di Pantai Teleng Ria yang terletak di wilayah Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
3. Metode pengambilan keputusan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analytic Hierarchy Process (AHP)* melalui Software expert choice.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan Tugas Akhir ini dibuat dengan urutan sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Menjelaskan mengenai latar belakang pengambilan tema penelitian, menjabarkan permasalahan dan tujuan, serta batasan-batasan masalahnya.

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian. Juga menjelaskan hasil penelitian orang lain yang dijadikan sebagai sumber referensi.

## BAB III: METODOLOGI

Menguraikan tentang langkah-langkah penelitian yang dilakukan, mulai dari prosedur awal seperti perumusan masalah dan tujuan, jalannya proses penelitian hingga tahap akhir yaitu mendapatkan penyelesaian permasalahan.

## BAB IV: KONDISI DAERAH STUDI

Bab ini berisi tentang kondisi daerah studi dan sumberdaya yang ada di daerah tersebut, antara lain kondisi lingkungan, sosial, hukum, ekonomi dan lain sebagainya.

## BAB V: ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian yang paling penting dalam suatu laporan penelitian. Isinya menjelaskan hasil yang didapatkan dari pengolahan data, dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang ada.

## BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

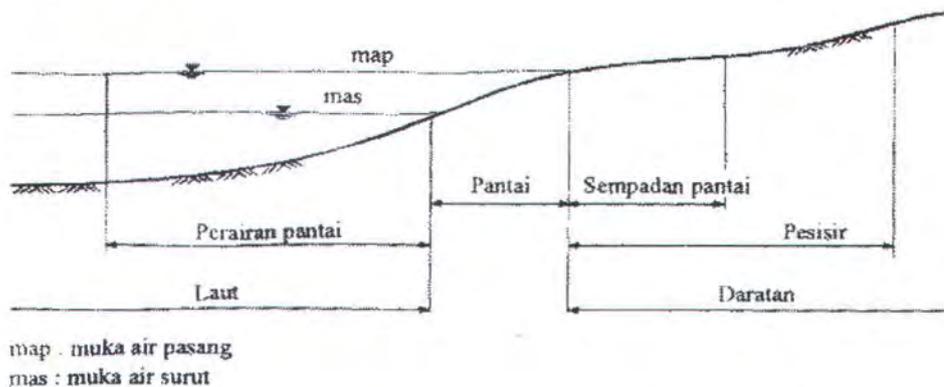
Bab ini berisi kesimpulan yang didasarkan analisa pada bab sebelumnya, dan menjawab permasalahan-permasalahan yang dikemukakan di awal penelitian. Dengan keterbatasan penelitian, maka dapat merekomendasikan dalam bentuk saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Wilayah Pesisir

Departemen Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (2003) mendefinisikan wilayah pesisir sebagai kawasan peralihan yang menghubungkan antara ekosistem darat dan ekosistem laut, yang terletak diantara batas sempadan ke arah darat sejauh pasang tertinggi dan ke arah laut sejauh pengaruh aktivitas dari daratan. Gambaran skematik pembagian wilayah pesisir dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini:



Gambar 2.1 Definisi Wilayah Pesisir (Triatmodjo, 1999)

Sedangkan definisi wilayah pesisir secara umum menurut Beatly (2002) dalam Wiyana (2004) adalah suatu wilayah pertemuan antara beberapa ekosistem, yaitu ekosistem darat, laut, dan udara dalam suatu keseimbangan yang rentan.

Keanekaragaman yang dimiliki kawasan pesisir menyebabkan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pesisir cenderung berlebihan dan tidak mempertimbangkan keberlanjutan kawasan tersebut. Sehingga, dalam merencanakan dan mengelola pembangunannya diperlukan pendekatan khusus (Dahuri *et al*, 2001).

Adanya ilmu baru dalam mengelola wilayah pesisir, yaitu Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu (*Integrated Coastal Zone Management* atau ICZM) semakin mendorong

kegiatan mempelajari, meneliti dan mengaplikasikan teori dan konsep yang ada (Akhwady, 2002).

Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu itu sendiri adalah pengelolaan/pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di kawasan pesisir, dengan cara melakukan penilaian menyeluruh tentang kawasan pesisir, menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan. Setelah itu, merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya, guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan (Dahuri *et al*, 2001).

## 2.2 Potensi Wilayah Pesisir

Potensi di wilayah pesisir secara garis besar terdiri dari tiga kelompok (Latama *et al*, 2002): sumber daya dapat pulih, sumber daya tak dapat pulih, dan jasa-jasa lingkungan.

### 1. Sumber daya dapat pulih (*renewable resources*)

Sumber daya dapat pulih terdiri dari hutan *mangrove*, rumput laut, terumbu karang, sumber daya perikanan laut, dan padang lamun.

### 2. Sumber daya tak dapat pulih (*non-renewable resources*)

Sumber daya tak dapat pulih mencakup antara lain: minyak dan gas, bijih besi, pasir laut, mineral dan bahan tambang lainnya.

### 3. Jasa-jasa lingkungan (*environmental services*)

Jasa-jasa lingkungan yang dimaksud meliputi fungsi kawasan pesisir dan lautan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, media transportasi dan komunikasi, sumber energi, sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan keamanan, penampungan limbah, pengatur iklim, kawasan lindung, dan sistem penunjang kehidupan serta fungsi fisiologis lainnya.

### 2.3 Permasalahan Wilayah Pesisir

Menurut Dahuri *et al* (2001), secara garis besar permasalahan wilayah pesisir yang mengancam kelestarian sumber daya pesisir di Indonesia terdiri dari:

a. Pencemaran lingkungan.

Perairan pesisir selama ini menjadi tempat pembuangan limbah, baik dari kegiatan manusia yang berasal dari dalam wilayah pesisir maupun dari luar. Pembuangan limbah yang berlebihan tanpa pengolahan (*treatment*) yang baik, menyebabkan pencemaran lingkungan di laut dan pesisirnya. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, sumber daya dan kehidupan biotanya.

b. Degradasi/kerusakan fisik habitat.

Kerusakan fisik habitat wilayah pesisir dan lautan di Indonesia mengakibatkan penurunan kualitas ekosistem, seperti ekosistem mangrove, terumbu karang dan rumput laut. Ekosistem mangrove dan terumbu karang di Indonesia merupakan dua ekosistem yang mengalami kerusakan cukup parah.

c. Eksploitasi sumber daya secara berlebihan.

Apabila pemanfaatan lebih besar daripada tangkapan optimum, maka akan terjadi pemanfaatan yang berlebihan. Salah satu sumber daya laut yang telah dieksploitasi secara berlebih adalah ikan.

d. Konservasi kawasan lindung menjadi kawasan pembangunan.

Kegiatan pembangunan merupakan kegiatan yang memiliki dampak positif dan negatif. Selain meningkatkan kesejahteraan rakyat, kegiatan pembangunan dapat berdampak negatif terhadap keberadaan ekosistem, terutama di wilayah pesisir dan lautan. Seringkali pembangunan di wilayah pesisir dan laut tidak memperhatikan faktor ekologis/lingkungan dan mengubah fungsi kawasan lindung menjadi kawasan produktif, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan.

e. Bencana alam.

Bencana alam merupakan fenomena alami, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berdampak negatif bagi lingkungan pesisir dan lautan. Bencana alam yang sering terjadi antara lain kenaikan muka air laut dan gelombang pasang tsunami.

## **2.4. Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu**

Pengertian tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu (*Integrated Coastal Zone Management* atau *ICZM*) menurut Sorensen (1990) dalam Dahuri (2001) adalah pengaturan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) yang terdapat di kawasan pesisir. Pengaturan yang dimaksud adalah dengan cara melakukan penilaian menyeluruh (*comprehensive assessment*) tentang kawasan pesisir beserta sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan di dalamnya. Kemudian menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan, merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya, guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Proses pengelolaan ini dilaksanakan secara berkesinambungan dan dinamis dengan mempertimbangkan segenap aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspirasi masyarakat pengguna kawasan pesisir (*stakeholders*) serta konflik kepentingan dan konflik pemanfaatan kawasan pesisir yang mungkin ada.

Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) mengandung tiga unsur (dimensi) utama yang meliputi: dimensi ekonomi, ekologi (lingkungan) dan sosial (Noor, 2005). Dikatakan berkelanjutan apabila: secara ekonomis dapat efisien serta layak, secara ekologis lestari (ramah lingkungan), dan secara sosial berkeadilan.

## **2.5 Pengolahan Kuisisioner**

### **2.5.1 Perhitungan Besarnya Sampel**

Perhitungan besarnya sampel dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jumlah sampel minimum yang harus diambil dalam penelitian. Ada beberapa formulasi dalam penentuan besar sampel menurut Ruseffendi (1994), yaitu:

- a. Formulasi untuk pendekatan rata-rata populasi
  - Formulasi tanpa menggunakan koreksi  
Digunakan untuk populasi tak terbatas atau pengambilan dengan pengembalian.

$$n = \frac{z^2 \sigma_r^2}{j^2} \dots\dots\dots (2.1)$$

dengan:

- n = besarnya ukuran sampel
- j = setengah jarak kekeliruan terhadap rata-rata hitung yang dapat ditoleransi, dengan rumus berikut:

$$j = z\sigma_x / \sqrt{N} \text{ atau } j = z\sqrt{p(1-p)/N}$$

- N = besarnya ukuran populasi
- $\sigma_x$  = standar deviasi populasi
- z = nilai standar deviasi untuk derajat kefidensi terpilih

Nilai standar deviasi untuk setiap derajat kefidensi dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Derajat Kefidensi

Derajat Kefidensi	z
99.5	3.25
99	2.575
95	1.96
90	1.645
80	1.245
75	1.151

Sumber: Meyers, Fred E dkk, 2002

- Formulasi dengan menggunakan koreksi  
Digunakan untuk pengambilan sampel yang tanpa pengembalian pada populasi terbatas.

$$n = \frac{Nz^2\sigma_x^2}{j^2(N-1) + z^2\sigma_x^2} \dots\dots\dots (2.2)$$

b. Formulasi untuk pendekatan proporsi populasi

- Formulasi tanpa menggunakan koreksi

$$n = \frac{z^2 p(1-p)}{j^2} \dots\dots\dots (2.3)$$

dengan:

$p$  = perbandingan (nilai pendekatan) antara subjek yang menjadi objek dengan seluruh subjek. Bila tidak diketahui, bisa diasumsikan 0.5.

- Formulasi dengan menggunakan koreksi

$$n = \frac{Nz^2 p(1-p)}{j^2(N-1) + z^2 p(1-p)} \dots\dots\dots (2.4)$$

Perhitungan besarnya sampel ini dilakukan setelah penelitian atau setelah penyebaran kuisioner tahap pertama. Dengan demikian, maka dapat diketahui kecukupan sampel dalam penelitian yang dilakukan.

### 2.5.2 Perhitungan Rata-Rata Geometrik

Proses yang dilakukan setelah pengumpulan kuisioner adalah melakukan pembobotan terhadap hirarki yang ada dalam pertanyaan. Nilai-nilai yang diperoleh dari kuisioner sangat beragam, maka untuk mendapatkan kepastian nilai dilakukan pengambilan rata-rata geometrik. Metode pengambilan nilai rata-rata geometrik dilakukan berdasarkan ketentuan yang dirumuskan oleh Saaty (1993) dengan formula matematis sebagai berikut:

$$\sqrt[n]{a_1 \times a_2 \times a_3 \times \dots \times a_n} = w \dots\dots\dots(2.5)$$

dimana:

- $n$  = jumlah responden
- $a_i$  = angka penilaian dari responden ke-i

Nilai rata-rata geometri yang didapatkan meliputi semua tingkatan dalam hirarki. Selanjutnya, untuk analisa prioritas upaya pengelolaan sumberdaya pesisir digunakan bantuan program *Expert Choice Professional*.

## 2.6 Metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP)

Dalam penentuan prioritas program yang sesuai untuk wilayah pesisir berdasarkan potensi wilayahnya, dibutuhkan metode yang sesuai. Salah satu metodenya adalah *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Dengan metode tersebut dapat digunakan untuk mengukur peran serta *stakeholders* dalam merumuskan dan menentukan kebijakan berdasar kepentingan bersama (Akhwadhy, 2002).

*Analytic Hierarchy Process* (AHP) itu sendiri dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970 dan dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks dan tidak terstruktur untuk dipecahkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu dan kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki (Umamah, 2003). Selanjutnya memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif dan akhirnya dengan suatu sintesa ditentukan elemen mana yang mempunyai prioritas tertinggi. Sedangkan menurut Forman (*Decision by Objectives*), *Analytic Hierarchy Process* merupakan salah satu metode sistematis untuk pengambilan keputusan dengan membandingkan beberapa alternatif atau kriteria, yang dapat membantu kerangka berpikir manusia.

Kelebihan yang dimiliki metode ini antara lain: melibatkan beberapa kriteria secara bersamaan menurut struktur preferensi tertentu dan mengintegrasikan ke dalam proses rancangan (Rosyid, 1993 dalam Akhwadhy, 2002). Kelebihan lainnya adalah dapat memecahkan masalah yang “multiobjektif” dan “multikriteria”, fleksibilitas tinggi dalam pembuatan kriteria, bersifat demokratis (mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan), dan menggunakan input yang kuantitatif dan kualitatif (persepsi manusia).

Sedangkan kelemahan yang dimiliki metode AHP ini antara lain ketergantungan model pada input yang berupa persepsi seorang ahli (*expert*).

### 2.6.1 Prinsip-Prinsip *Analytic Hierarchy Process*

Prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam menyelesaikan persoalan AHP diantaranya adalah:

#### 1. *Decomposition*

Yaitu menggambarkan dan menguraikan secara hirarkis atau menyusun secara hirarkis dengan memecah-mecah persoalan menjadi unsur-unsur yang terpisah.

#### 2. *Comparative Judgement* (Penilaian Perbandingan)

Tahap penilaian perbandingan pasangan merupakan tahap terpenting dalam analisis hirarki, dimana dalam tahap ini dibandingkan tingkat kepentingan antara komponen yang satu dengan yang lainnya. Dengan membandingkan sejumlah kombinasi elemen pada setiap hirarki, dilakukan penilaian kuantitatif untuk mengetahui besarnya bobot setiap elemen. Maka, Saaty (1988) menetapkan skala kuantitatif seperti dalam tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Skala Dasar

Tingkat Kepentingan	Definisi
1	Elemen ke-i sama pentingnya dengan elemen ke-j
3	Elemen ke-i sedikit lebih penting dengan elemen ke-j
5	Elemen ke-i lebih penting dengan elemen ke-j
7	Elemen ke-i sangat lebih penting dengan elemen ke-j
9	Elemen ke-i mutlak penting dengan elemen ke-j
2,4,6,8	Nilai diantara dua kepentingan yang berdekatan
Kebalikan ( <i>reciprocal</i> )	Jika aktivitas i mendapat 1 angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, maka j mempunyai kebalikannya dengan nilai i.

Sumber: Saaty, 1988

#### 3. *Synthesis of Priority*

Pembedaan prioritas dan sintesis yang disebut penetapan prioritas yaitu menentukan peringkat elemen-elemen menurut relatif pentingnya. Hasil dari proses pembedaan ini adalah suatu vektor prioritas, atau relatif pentingnya elemen terhadap setiap sifat.

#### 4. *Logical Consistency*

Yaitu menjamin bahwa semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingkatkan secara konsisten sesuai dengan suatu kriteria yang logis. Dalam mempergunakan

prinsip ini, AHP memasukkan aspek kualitatif dan aspek kuantitatif. Aspek kualitatif untuk mendefinisikan persoalan dan hirarkinya. Sedangkan aspek kuantitatif untuk mengekspresikan penilaian dan preferensi secara ringkas padat.

### 2.6.2 Tahap-Tahap Penyusunan Hirarki

Tahap-tahap dalam penyusunan suatu hirarki menurut Saaty (1994) dalam Umamah (2003) adalah sebagai berikut:

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan secara khusus solusi yang diharapkan.
2. Penyusunan hirarki dimulai dengan tujuan yang umum, diikuti oleh sub tujuan, kriteria dan kemungkinan diikuti alternatif-alternatif penyelesaian pada tingkatan hirarki paling bawah.
3. Menyusun matrik perbandingan berpasangan yang mempunyai kontribusi hubungan relatif atau pengaruh pada masing-masing tujuan atau kriteria yang akan dikembangkan pada tingkat yang lebih atas.
4. Melakukan proses perbandingan pasangan sehingga diperoleh *judgement* seluruhnya sebanyak  $(n(n-1))/2$  buah, dimana  $n$  adalah banyaknya komponen yang dibandingkan.
5. Setelah diperoleh data perbandingan pasangan, kemudian dihitung nilai *eigen vector* dan memeriksa indeks konsistensinya. Jika tidak konsisten, maka pengambilan data harus diulang.
6. Mengulangi tahap 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat dan kelompok hirarki.
7. Menghitung *eigen vector* dari setiap matrik perbandingan pasangan diatas, dimana nilai dari *eigen vector* merupakan bobot setiap komponen.
8. Memeriksa indeks konsistensi hirarki (*Consistency Ratio*), jika nilai CR lebih besar dari 10% (0,1), maka kualitas data *judgement* harus diperbaiki.

### 2.6.3 Formulasi Matematis pada Model *Analytic Hierarchy Process*

Pada model *Analytic Hierarchy Process*, formulasi matematisnya pada dasarnya menggunakan matrik yang dilakukan dengan mengasumsikan komponen yang akan dinilai tingkat kepentingannya secara berpasangan. Komponen-komponen *judgment* terdiri atas bilangan  $C_1, C_2, \dots, C_n$  yang saling berpasangan. Kemudian komponen  $C_i$  dengan  $C_j$  dibuat dalam matrik  $A(n \times n)$  sebagai berikut:

$$A = (a_{ij}) \quad (ij = 1,2,3,\dots,n) \dots\dots\dots (2.6)$$

Syarat nilai  $a_{ij}$  yang ditentukan adalah:

1. Jika  $a_{ij} = \alpha$ , maka  $a_{ji} = 1/\alpha, \alpha \neq 0$ .
2. Jika  $C_i$  adalah tingkat kepentingan yang sama dengan  $C_j$ , maka  $a_{ij} = a_{ji} = 1$ .
3. Hal yang khusus,  $a_{ii} = 1$  untuk semua  $i$ .

Selanjutnya, dapat dibuat struktur masalah tersebut ke dalam sebuah komponen matrik  $A$ , apabila nilai yang dimasukkan sudah memenuhi persyaratan. Komponen matrik  $A$  mempunyai bentuk sebagai berikut:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 1/a_{12} & 1 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1/a_{1n} & 1/a_{2n} & \dots & 1 \end{pmatrix} \dots\dots\dots (2.7)$$

Hasil yang didapatkan dari penilaian (*judgment*) secara berpasangan berupa komponen ( $C_i, C_j$ ), selanjutnya diubah ke dalam bentuk nilai berupa  $a_{ij}$  pada matrik  $A$ . Pembobotan  $C_1, C_2, \dots, C_n$  dilakukan dengan menyatakan komponen tersebut dengan  $w_1, w_2, \dots, w_n$ .

Langkah berikutnya adalah mengasumsikan penilaian berdasarkan angka pengukuran. Dilakukan dalam kondisi tidak ada penyimpangan (*deviation*) yang disebabkan akibat kesalahan pengukuran yang tidak pernah akurat, dan banyak disebabkan akibat kesalahan manusia. Dimana hubungan antara bobot  $w_i$  dengan hasil penilaian  $a_{ij}$  adalah:

$$w_1/w_2 = a_{ij} \quad (\text{untuk } ij = 1,2,3,\dots,n) \dots\dots\dots (2.8)$$

Dengan perubahan matrik berikut ini:

$$A = \begin{pmatrix} w_1/w_1 & w_1/w_2 & \dots & w_1/w_n \\ w_2/w_1 & w_2/w_2 & \dots & w_2/w_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_n/w_1 & w_n/w_2 & \dots & w_n/w_n \end{pmatrix}$$

dalam kondisi tertentu yang disebabkan adanya penyimpangan pada baris 1 dari matrik A. Pada kasus ideal, nilai-nilai elemen  $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}$  sama dengan rasio:

$$w_i/w_1, w_i/w_2, w_i/w_j, w_i/w_n$$

Dengan mengalikan elemen pertama baris tersebut dengan  $w_1$  dan elemen kedua dengan  $w_2$ , dan seterusnya, akan diperoleh:

$$w_i/w_1 \cdot w_1 = w_i, w_i/w_2 \cdot w_2 = w_i, \dots, w_i/w_j \cdot w_j = w_i, w_i/w_n \cdot w_n = w_i$$

Selanjutnya akan diperoleh elemen

$$w_i, w_i, \dots, w_i$$

Secara umum apabila nilai elemen baris adalah  $w_1$ , maka dapat diambil harga rata-rata dari  $w_1$  yaitu:

$$w_i = \text{rata-rata dari } (w_{i1} w_1, w_{i2} w_2, \dots, w_{in} w_n)$$

$$w_i = 1/n \sum a_{ij} w_j^n (i = 1, 2, \dots) \dots \dots \dots (2.9)$$

Besar nilai  $a_{ij}$  haruslah sama dengan  $w_i/w_j$ , karena apabila tidak sama besar nilai tersebut akan mempengaruhi jawaban persamaan di atas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan dengan merubah besar nilai n dengan besar nilai  $\lambda_{\max}$ , sehingga:

$$w_i = 1/\lambda_{\max} \sum a_{ij} w_j (i = 1, 2, \dots)$$

$$w_i = 1/\lambda_{\max} \sum a_{ij} w_j^n \dots \dots \dots (2.10)$$

Nilai tersebut selanjutnya disebut dengan *eigenvalue* yang merupakan *eigenvalue* maksimum dari matrik A. Selanjutnya dari persamaan 2.7 diturunkan dalam bentuk berikut ini:

$$1. a_{ij}, a_{ik} = (w_i/w_j) \cdot (w_j/w_k) = (w_i/w_k) = a_{ik}$$

Persamaan harus merupakan konsistensi penilaian dari elemen matrik.

$$2. a_{ji} = w_i/w_j = 1/(w_j/w_i) = 1/a_{ij}$$

Merupakan matrik resiprok (kebalikan) dengan bentuk perkalian matrik sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} w_1/w_1 & w_1/w_2 & \dots & w_1/w_n \\ w_2/w_1 & w_2/w_2 & \dots & w_2/w_n \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ w_n/w_1 & w_n/w_2 & \dots & w_n/w_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \cdot \\ w_n \end{bmatrix} = n \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \cdot \\ w_n \end{bmatrix} \dots \quad (2.11)$$

Persamaan 2.11 dapat dinyatakan dalam bentuk:  $Aw = nw$  atau  $(A-nI)w = 0$ , dengan I adalah matrik identitas. Persamaan ini memiliki penyelesaian (bukan nol) jika dan hanya jika n adalah *eigenvalue* dari matrik A dan w adalah *eigenvector*-nya.

#### 2.6.4 Perhitungan Indeks Konsistensi

Menurut Noor (2005), konsistensi logis menunjukkan intensitas relasi antar pendapat yang didasarkan pada suatu kriteria dan saling membenarkan secara logis. Tingkat konsistensi menunjukkan suatu pendapat mempunyai nilai yang sesuai dengan pengelompokan elemen pada hirarki. Tingkat konsistensi juga menunjukkan tingkat akurasi suatu pendapat terhadap elemen-elemen pada suatu tingkat hirarki.

Perhitungan indeks konsistensi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CI = (\lambda_{\max} - n)/(n-1) \dots \dots \dots \quad (2.12)$$

dimana:

- CI : indeks konsistensi
- n : orde matrik
- $\lambda_{\max}$  : *eigenvalue* maksimum

### 2.6.5 Perhitungan Rasio Konsistensi

Rasio konsistensi merupakan nilai yang dihasilkan dengan membandingkan besar nilai indeks konsistensi (CI) dengan indeks random (RI), yang didefinisikan sebagai berikut:

$$CR = CI/RI \dots\dots\dots (2.13)$$

dimana:

- CR : rasio konsistensi
- CI : indeks konsistensi
- RI : indeks random

Apabila nilai CR lebih kecil atau sama dengan 10%, maka *eigenvector* maksimum yang didapatkan dari hasil pembobotan dianggap mempunyai nilai konsisten.

Sedangkan untuk nilai indeks random dinyatakan dalam matrik berorde 1 sampai 15, seperti pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Indeks Random untuk Tiap Orde Matrik

Orde Matrik	1	2	3	4	5	6	7	8
Indeks Random	0.00	0.00	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41
Orde Matrik	9	10	11	12	13	14	15	
Indeks Random	1.45	1.49	1.51	1.48	1.56	1.57	1.59	

Sumber: Saaty, 1988

### 2.7 Expert Choice Professional

*Expert Choice software* merupakan program pendukung pengambilan keputusan multi kriteria yang berbasis pada metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Teori matematis AHP sendiri pertama kali dikembangkan oleh Thomas L. Saaty tahun 1970.

*Software* ini memiliki metode yang unik untuk menentukan prioritas, yaitu dengan menggunakan perbandingan berpasangan (*pairwise comparisons*). Sehingga prioritas yang dihasilkan lebih akurat dalam nilai dan pencerminan persepsi respondennya.

Program *Expert Choice* dilengkapi dengan icon *Structuring* serta *Evaluation and Choice*. Icon *Structuring* untuk membuat struktur masalah, sedangkan *Evaluation and Choice* digunakan untuk membuat model, membuat penilaian, menetapkan prioritas, melakukan analisa sensitivitas serta membuat keputusan.

Langkah pertama yang dilakukan dalam menggunakan program ini adalah membuat model. Selanjutnya dilakukan langkah operasi dengan mengevaluasi elemen-elemen yang telah dibuat melalui perbandingan berpasangan yang terdapat pada icon *Pairwise Assessment*. Tahap berikutnya yaitu dilakukan pembobotan dan penggabungan seluruh prioritas pada model yang dibuat dengan mengarah pada hasil akhir. Proses ini terdapat pada icon *Synthesis*.

Langkah terakhir yang dilakukan dalam mengoperasikan program ini adalah melakukan analisis sensitivitas pada icon *Sensitivity Analysis*. Proses ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh perubahan nilai suatu kriteria terhadap nilai alternatif-alternatif yang ada. Ada 5 model grafik yang tersedia dalam analisis sensitivitas ini, yaitu:

- *Performance Sensitivity*, menetapkan informasi sensitivitas dengan grafik tunggal
- *Dynamic Sensitivity*, bentuknya berupa grafik batang yang menunjukkan prosentase nilai antara level kedua dalam model hirarki dengan alternatif penyelesaian.
- *Gradient Sensitivity*, berupa garis horisontal yang menunjukkan nilai antara level kedua dalam model hirarki dengan alternatif.
- *2D Plot*, berupa lingkaran kecil/node yang menunjukkan nilai antara level kedua dalam model hirarki dengan alternatif.
- *Differences*, berupa grafik batang bertingkat menunjukkan alternatif yang terpilih dibandingkan dengan alternatif lainnya.

Fungsi kelima grafik di atas adalah sama, yang membedakan hanya bentuk dan tampilannya.

## 2.8 Model Hirarki Rencana Manajemen Sumber Daya Wilayah Pesisir, Studi Kasus di Kabupaten Pacitan

Hirarki merupakan peralatan utama dari model *Analytic Hierarchy Process* yang didasari persepsi manusia. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dipecah ke dalam kelompok-kelompoknya dan kemudian kelompok-kelompok tersebut diatur menjadi suatu bentuk hirarki (Saaty, 1993).

Struktur hirarki yang dibuat dalam rencana manajemen sumber daya pesisir di Kabupaten Pacitan ini secara umum didapatkan dari data sekunder dan survei awal, struktur hirarki tersebut antara lain terdiri dari:

a. Tujuan/fokus (tingkat pertama)

Tujuan dari penelitian ini merupakan tingkat pertama dari model hirarki yang dibuat yaitu: *Rencana Manajemen Sumber Daya Pesisir di Kabupaten Pacitan* yang disusun atas kriteria-kriteria yang relevan.

b. Pelaku (tingkat kedua)

Dalam pengelolaan sumber daya pesisir, kerjasama antar pelaku (*stakeholder*) sangat diperlukan. Masyarakat pesisir sebagai subjek dan objek pengelolaan membutuhkan peran pemerintah sebagai perumus rencana pengelolaan. Sedangkan dunia usaha juga berperan sebagai stimulus tumbuhnya perekonomian masyarakat pesisir. Maka, pada tingkatan kedua ini, yang dimaksudkan dengan pelaku adalah masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku industri.

c. Kriteria/bidang (tingkat ketiga)

Pengelolaan sumber daya pesisir akan berjalan sesuai dengan perencanaan apabila didasarkan pada situasi dan kondisi wilayah itu sendiri. Beberapa kriteria pada tingkat ketiga hirarki meliputi hukum, ekonomi, lingkungan dan sosial.

d. Aspek (tingkat keempat)

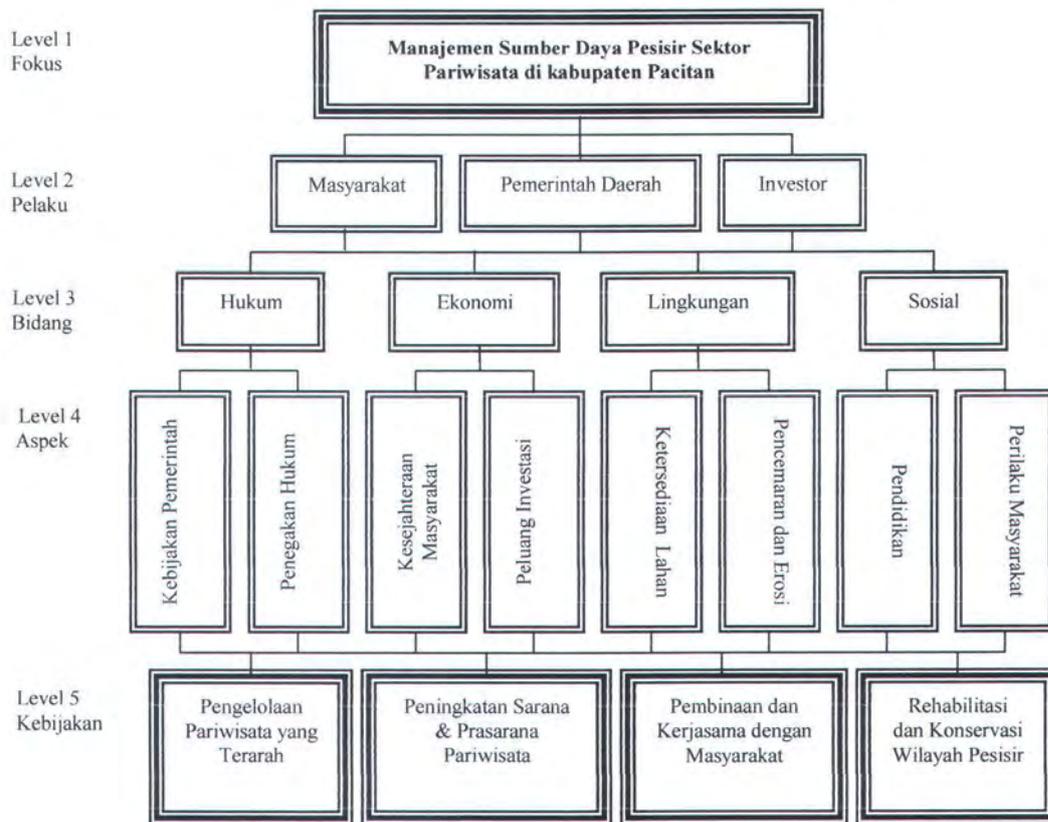
Pada tingkat ini diberikan beberapa aspek-aspek pengelolaan wilayah pesisir sesuai dengan bidang pengembangan. Berdasarkan kriteria Hukum, aspek yang ditinjau adalah: Kebijaksanaan pemerintah, Penegakan hukum. Kriteria Ekonomi dengan aspek yang ditinjau adalah: Kesejahteraan masyarakat, Peluang investasi. Pada kriteria Lingkungan, aspek yang ditinjau adalah: Ketersediaan lahan, Pencemaran dan erosi.

Sedangkan pada kriteria Sosial, aspek yang ditinjau adalah: Pendidikan, Perilaku masyarakat.

e. Alternatif/kebijakan (tingkat kelima)

Tingkat ini merupakan prioritas sebagai keputusan atau kebijakan dalam pengelolaan wilayah pesisir sesuai dengan potensi yang ada. Berdasarkan potensi dan kondisi pesisir Kabupaten Pacitan, maka beberapa alternatif dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kabupaten Pacitan yang ditinjau antara lain: Pengelolaan Pariwisata yang terarah, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata, Pembinaan dan Kerjasama dengan Masyarakat serta Rehabilitasi dan konservasi wilayah pesisir.

Model struktur hirarki untuk Tugas Akhir ini dapat dilihat pada gambar 2.2 sebagai berikut:

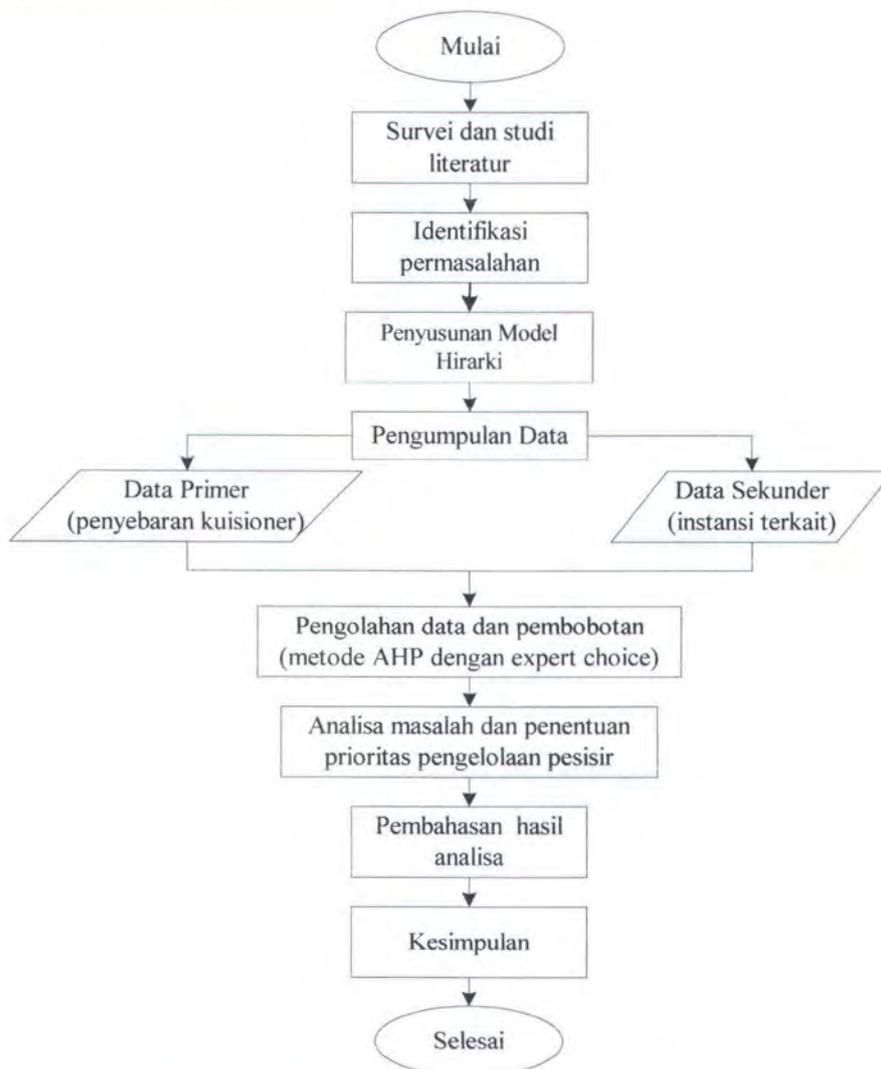


Gambar 2.2 Model Hirarki Rencana Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mempermudah pengerjaan penulisan Tugas Akhir ini, maka urutan kerja harus disusun secara sistematis, sehingga didapatkan hasil yang maksimal dan pengalokasian waktu yang optimal. Adapun urutan kegiatan atau diagram alir dalam pengerjaan Tugas Akhir ini dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1 Diagram Alir Metodologi Penulisan

Dari diagram alir diatas, dapat dijelaskan secara singkat masing-masing urutan pengerjaan Tugas Akhir sebagai berikut:

### 1. Tahap Identifikasi Permasalahan

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah mendefinisikan permasalahan dan tujuan yang akan dibahas. Untuk dapat mendefinisikan permasalahan tersebut, maka dilakukan survei langsung ataupun mempelajari data-data yang sudah ada untuk mengetahui kondisi wilayah studi. Selain itu, studi literatur juga dilakukan untuk mempelajari buku-buku, jurnal penelitian dan lain-lain yang mendukung tema yang diangkat.

### 2. Penyusunan Model Hirarki.

Proses ini merupakan bagian penting dalam pengerjaan metode AHP. Penyusunan model hirarki didasarkan pada kondisi wilayah yang diteliti, yaitu wilayah pesisir Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

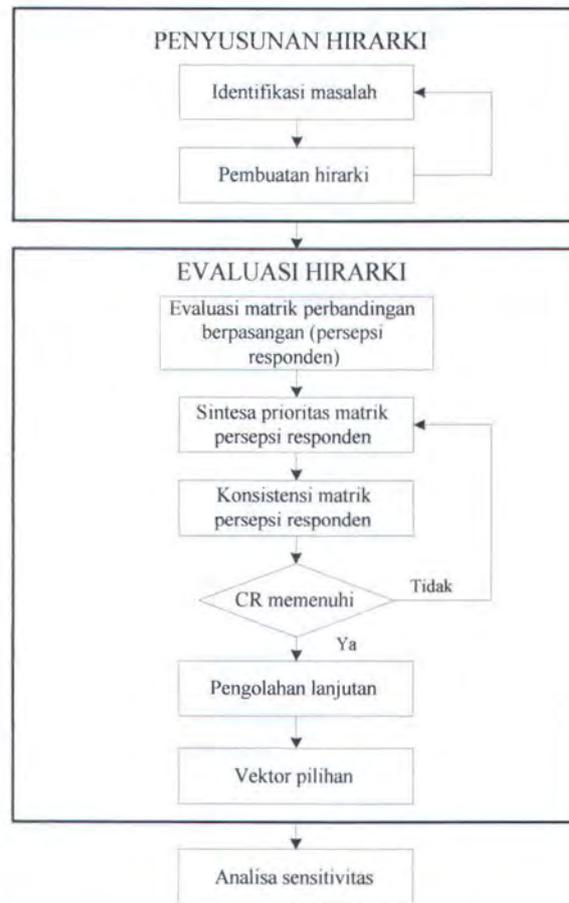
### 3. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam pengerjaan Tugas Akhir ini adalah data primer dan sekunder.

- Data primer diperoleh melalui studi ke lapangan dan menyebarkan kuisisioner kepada masyarakat setempat. Untuk teknik pengambilan sampel sebagai sasaran penyebaran kuisisioner digunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel untuk tujuan tertentu saja. Dengan menggunakan teknik tersebut diharapkan bisa memperoleh sampel yang representatif yang mengerti tentang pengelolaan (manajemen) sumberdaya pesisir sektor pariwisata.
- Data sekunder diperoleh melalui instansi-instansi yang terkait, antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Kecamatan, Kantor Desa dan Web site resmi Pemerintah Kabupaten Pacitan.

### 4. Pengolahan Data dan Pembobotan

Data yang diperoleh, selanjutnya diolah menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dengan bantuan program *Microsoft Excel* dan *Expert Choice Professional version 9.0*. Untuk pengolahan dengan AHP, urutan pengerjaannya dapat dilihat pada gambar 3.2 sebagai berikut:



Gambar 3.2 Diagram Alir Metodologi *Analytic Hierarchy Process*

Penjelasan gambar 3.2 adalah sebagai berikut:

1) Evaluasi matrik perbandingan berpasangan

Pada tahapan ini, proses yang dilakukan adalah pengisian matrik perbandingan berpasangan yang didapatkan dari kuisioner.

2) Sintesa prioritas matrik persepsi responden

Proses selanjutnya adalah sintesa prioritas matrik, yaitu dicari bobot prioritas atau *eigenvalue* setiap elemen dalam matrik.

3) Konsistensi matrik persepsi responden

Pada tahapan ini, yang dilakukan adalah menghitung indeks konsistensi (CI) dan rasio konsistensi (CR). Apabila rasio konsistensinya kurang dari 10%, berarti data dianggap memenuhi syarat. Dan apabila lebih dari 10%, maka perlu ditinjau ulang bobot prioritasnya.

#### 4) Vektor prioritas

Vektor prioritas atau *eigenvector* merupakan nilai yang menunjukkan prioritas pada setiap kriteria/sektor dari hirarki.

#### 5) Analisa Sensitivitas

Analisa ini digunakan untuk mengetahui pengaruh perubahan suatu nilai prioritas terhadap prioritas yang lain. Dalam model hirarki penelitian ini, akan diketahui pengaruh perubahan nilai prioritas pelaku (tingkat 2) terhadap nilai prioritas alternatif programnya (tingkat 4).

#### 5. Analisa dan Pembahasan

Pada tahapan ini, data yang telah diolah akan dianalisa dan dibahas dalam sub bab pembahasan mengenai hasil analisa yang telah dilakukan.

#### 6. Kesimpulan

Pada tahapan ini berisi kesimpulan yang mencakup inti dari analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya. Dan juga menjawab permasalahan dari penelitian yang dilakukan.

## BAB IV

### KONDISI DAERAH STUDI

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di pesisir selatan Propinsi Jawa Timur. Letak geografis Kabupaten Pacitan ini berada antara 110°5'-111°25' Bujur Timur dan 7°55'-8°17' Lintang Selatan.

Kabupaten ini merupakan pintu gerbang Jawa Timur bagian selatan di ujung paling barat, dan berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo

Gambaran lokasi selengkapny dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini:



Jarak orbitasi ke beberapa kota besar adalah sebagai berikut:

- 256 km dari kota Surabaya
- 125 km dari kota Madiun
- 81 km dari kota Ponorogo
- 117 km dari kota Surakarta
- 116 km dari kota Yogyakarta
- 217 km dari kota Semarang
- 370 km dari kota Bandung
- 600 km dari kota Jakarta dan Bali

Luas wilayah Kabupaten Pacitan  $\pm 1.389,87 \text{ km}^2$  yang sebagian besar berupa perbukitan dan tanah kapur yang merupakan bagian pegunungan kapur selatan yang membentang dari Gunung Kidul ke Trenggalek menghadap Samudera Indonesia. Secara administrasi, Kabupaten Pacitan terbagi menjadi 4 wilayah pembantu Bupati, 12 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 159 Desa.

Sektor pariwisata di Kabupaten Pacitan mempunyai peluang yang cukup prospektif untuk dikembangkan menjadi industri Pariwisata yang mampu bersaing dengan Pariwisata di daerah yang lain bahkan manca negara, ini cukup beralasan, karena obyek wisata yang ada cukup beragam dan mempunyai ciri khusus dan nilai lebih dibanding dengan daerah lainnya.

Pengembangan kepariwisataan tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan asli daerah semata, yang lebih penting kepariwisataan di Kabupaten Pacitan mampu memberdayakan masyarakat sendiri sehingga mereka merasa memiliki, melaksanakan, melestarikan, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui cara memberikan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha. Potensi Pariwisata di Kabupaten Pacitan meliputi Wisata Pantai, Wisata Goa, Wisata Budaya/ Religius, Wisata Rekreasi, Wisata Industri.

Obyek wisata Pantai Teleng Ria, Pantai ini menghadap ke Pantai Laut Selatan dengan hamparan pasir putih sepanjang  $\pm 3$  Km. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten ke lokasi wisata hanya 3.5 Km, dan dapat dengan mudah dicapai dengan berbagai jenis kendaraan. Berbagai sarana yang ada antara lain adanya gardu pandang untuk menikmati desiran ombak Pantai Laut Selatan, kolam renang dan arena bermain anak-anak, penginapan serba guna bonggo budoyo dan areal perkemahan, arena pemancingan, dan makanan khas Pacitan. Selain itu pantai ini digunakan juga untuk tempat pendaratan ikan (TPI) sehingga pengunjung dapat membeli ikan segar.

#### **4.1 Potensi Kawasan Pesisir dan Laut**

Wilayah Laut Kabupaten Pacitan yang termasuk dalam Wilayah IX Pengelolaan Ikan memiliki luas perairan yang mencapai  $7.636 \text{ km}^2$  (ZEEI) dengan garis pantai sepanjang 70.709 km atau 38,18 mil memiliki kekayaan alam yang sangat besar dan beragam produksi ikan laut dari tahun ke tahun.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian bahwa potensi lestari ikan di wilayah laut Kabupaten Pacitan adalah sebesar 34.438 ton/tahun (LPPL 1980). Namun pemanfaatan potensi ikan laut (dalam berbagai jenis yang termasuk Demersal, Pelagis Kecil dan Besar) pada sektor perikanan tangkap tersebut masih belum optimal, hal ini dikarenakan kemampuan nelayan dalam hal sumberdaya manusia, peralatan dan armada belum memadai. Sementara di sektor budidaya (*aquaculture*), masih belum menunjukkan indikasi keberhasilan dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi daerah tersebut.

Udang karang juga terdapat di pantai selatan belahan barat Jawa Timur, termasuk Kabupaten Pacitan dan dari yang teridentifikasi terdapat dua jenis yaitu *Panulirus homorus* (Linnaeus, 1758) dan *Panulirus penicillatus* (Oliver, 1792). Mereka hidup di perairan dangkal dan tinggal pada lubang-lubang batuan granit atau vulkanis. Udang karang ini dikenal juga sebagai "*Spiny Lobster*", sedangkan sebagian yang lain hidup pada sisi luar terumbu karang yang senantiasa menerima hantaman ombak yang keras. Udang karang ini ditangkap dengan menggunakan jaring atau melalui penyelaman.

Potensi lain yang ada di kawasan pesisir Pacitan adalah adanya habitat Rumput Laut, serta kondisi alam berupa beberapa pantai yang eksotik dan memungkinkan untuk dikembangkan dalam sektor pariwisata (*ecotourism*).

## **4.2 Karakteristik Kependudukan**

### **4.2.1 Struktur Sosial Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk**

Struktur penduduk Kabupaten Pacitan dari jumlah 671.040 jiwa yang ada terdiri dari Laki-laki sejumlah 334.040 jiwa dan Perempuan 337.364 jiwa. Komposisi struktur penduduk Pacitan pada wilayah perencanaan yang diamati di tujuh Kecamatan pesisir baik dari komposisi gender (*Sex Ratio*), angka partisipasi murni penduduk pada usia sekolah terhadap pendidikan, angkatan pencari kerja menurut tingkatan pendidikan yang dimiliki, tahapan kesejahteraan keluarga dan kepemilikan terhadap agama serta sektor pendidikan yang membentuk kualitas SDM di Kabupaten Pacitan tergambar dalam struktur angka murni AMP penduduk pada usia sekolah di samping itu tingkat kesejahteraan penduduk Pacitan, menurut tingkat kesejahteraan keluarga sebagai standar KKBN bagi jumlah kepala keluarga (KK) yang terdata menunjukkan masih tingginya jumlah keluarga pra sejahtera. Untuk jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan pada tahun 2000 mencapai 671.040 jiwa dengan angka pertumbuhan rata-rata 0.34% per-tahun.

### **4.2.2 Sosial Budaya Masyarakat**

Masyarakat Pacitan didominasi etnis Jawa dengan segala bentuk tata sosial dan budaya Jawa. Karakter sosial yang berpola Mataraman membentuk struktur sosiologi masyarakat agraris, sehingga mata pencaharian masyarakat Pacitan sementara ini lebih didominasi dari sektor pertanian dan perkebunan.

Adat istiadat yang berlaku dalam keseharian masyarakat Pacitan tidak jauh berbeda dengan masyarakat Jawa pada umumnya, termasuk dalam pemahaman mitologi dan kepercayaan apiritualisme. Sehingga pada masyarakat Pacitan dikenal ritual-ritual tertentu.

Sementara di pesisir selatan Jawa, masih berkembang kepercayaan mengenai mitos tentang laut selatan dan kekuasaan spiritual Nyai Roro Kidul. Hal ini tampak dengan adanya

budaya *Labuhan* di laut selatan setiap bulan Suro (*Jawa*) dengan menghanyutkan sesajen ke tengah laut dan menggelar kesenian Wayang Kulit pada malam harinya sebagai wujud syukur pada Yang Maha Kuasa dan permohonan keselamatan bagi kelangsungan hidup masyarakat nelayan di kawasan pesisir selatan tersebut.

### **4.3 Karakteristik Perekonomian**

#### **4.3.1 Sektor Pertanian Tanaman Pangan**

Produksi tanaman pangan yang paling tinggi adalah ubi kayu, yakni mencapai 458.586 ton. Dengan kata lain, bahwa produksi tanaman ubi kayu mencapai lebih dari 50% produksi tanaman pangan. Sedangkan produksi tanaman padi menduduki urutan kedua, yakni 140.999 ton. Selain produksi ubu kayu dan padi yang paling dominan ada produksi selain itu yakni jagung 33.975 ton, kacang tanah 5.905 ton dan ubi jalar 1.433 ton.

#### **4.3.2 Sektor Perkebunan**

Jenis komoditi perkebunan yang diusahakan di kecamatan Pacitan terdiri dari: Kelapa, cengkih, mlinjo, kopi, randu, jambu mente, manggis, duku, mangga, belimbing, durian, rambutan, pepaya, sukun, sirsak, salak, dan kakao. Jumlah produksi paling dominan adalah pepaya sebesar 56.580 ton dengan jumlah tanaman 10.176 pohon

#### **4.3.3 Sektor Peternakan**

Sapi potong merupakan ternak yang paling dominan diantara populasi ternak besar. Ternak sapi potong dipelihara rumah tangga petani karena sapi potong tidak hanya berfungsi sebagai dana cadangan (tabungan) tetapi juga dapat digunakan sebagai tenaga kerja pada saat pengolahan lahan padi sawah. Disamping itu, apabila memiliki banyak sapi potong maka setatus sosial rumah tangga meningkat.

Usaha peternakan yang dominan dikerjakan oleh rumah tangga petani adalah usaha ayam buras, sehingga populasi ayam buras mencapai 887.155 ekor.

#### 4.3.4 Sektor Kelautan dan Perikanan

##### a. Kondisi Masyarakat Nelayan

Kualitas sumber daya manusia perikanan di wilayah Kabupaten Pacitan kemampuan dan keterampilan teknik penangkapan ikan di laut yang dimiliki oleh nelayan masih rendah. Hal tersebut ditunjukkan oleh cara-cara yang dilaksanakan dalam kegiatan operasional dilaut masih sangat tradisional.

##### b. Kondisi Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung masih sangat terbatas. TPI yang ada terdapat:

- PPI Tamperan Kecamatan Pacitan (sedang dalam proses pembangunan fisik)
- TPI Watukarung Kecamatan Pringkuku
- TPI Pancer di Desa Kembang, TPI Teleng Kelurahan Sidoharjo dan TPI Tamperan, seluruhnya pada Kecamatan Pacitan
- TPI Wawaran Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung
- TPI Tawang Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo

Prasarana lain yang belum tersedia yaitu tempat penyimpanan mesin perahu, gudang es, instalasi air bersih dan bengkel, armada dan alat tangkap belum memadai apabila dibanding dengan potensi laut dan jumlah nelayan yang ada.

Kemudian beberapa potensi laut yang ada dalam pengembangan potensi wilayah pesisir telah di rintis untuk dikembangkan usaha-usaha sebagai berikut:

##### I. Perikanan tangkap

Penangkapan ikan yang dilakukan nelayan Pacitan relatif masih menggunakan teknologi yang sederhana dengan alat dan kemampuan yang terbatas. Dengan wilayah laut yang dimiliki luas perairan mencapai 7.636 km<sup>2</sup> (ZEEI) dengan garis pantai sepanjang 70.709 km atau 38.18 mil memiliki kekayaan alam yang

sangat besar dan beragam produksi ikan laut dari tahun ke tahun, maka perolehan tangkapan yang ada masih jauh dari kapasitas sumberdaya yang tersedia.

## **II. Budidaya**

Di Kabupaten Pacitan, usaha yang kini telah berkembang antara lain adalah:

- Usaha perikanan keramba dengan jenis ikan kerapu tikus (bebek) di wilayah Kecamatan Ngadirejo sebanyak 2 unit
- Usaha budidaya rumput laut di Pantai Tawang Kecamatan Ngadirejo sebanyak 60 rakit
- Usaha tambak udang windu di Kecamatan Pacitan seluas  $\pm$  8 Ha (dengan area produksi 4 Ha, dan area pendukung 4 Ha). Tambak ini dikelola oleh swasta (PT. Dwikarya Bangkit Sejahtera)

## **III. Pengolahan Hasil**

Salah satu mata rantai dari eksploitasi sektor perikanan dan kelautan ini adalah adanya usaha yang menindaklanjuti hasil-hasil tangkapan untuk kemudian diperlakukan secara ekonomis selain itu meningkatkan nilai jual (memberi nilai tambah pada komoditas) juga dalam upaya mempertahankan mutu dan kualitas fisik ikan yang secara alamiah relatif mudah rusak dan tidak tahan lama.

Sejauh ini di Kabupaten Pacitan, usaha pengolahan hasil yang dilakukan masih menggunakan teknologi sederhana dan tradisional serta bersifat industri rumahan (*home indutry*). Untuk itu perlu adanya peningkatan teknologi guna menghasilkan kualitas produk yang lebih baik, lebih variatif, dengan kapasitas produksi yang meningkat. Untuk pengolahan ikan terasi (*home indutry*) yang saat ini telah berjalan di Kelurahan Sirmoboyo, Kecamatan Pacitan adalah sebanyak 15 unit.

#### **4.3.5 Sektor Industri**

Pembangunan industri diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi yang kokoh dan seimbang yaitu struktur ekonomi dengan titik berat industri yang maju yang didukung oleh pertanian. Untuk itu proses industrialisasi diharapkan dapat mendukung perkembangan industri sebagai penggerak utama peningkatan laju pertumbuhan laju ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Perkembangan industri yang meliputi industri sedang dan industri kecil. Di Pacitan, kontribusi sektor industri pada tahun 1998 mengalami penurunan sebagai dampak krisis ekonomi. Tercatat kontribusi sektor ini PDRB dari Rp: 12.84 milyar, menjadi Rp: 12.07 milyar (3.61%)

Industri yang berkembang di Pacitan saat ini didominasi oleh industri kecil, baik bersifat formal. Total investasi yang ditanamkan pada sektor ini sebesar Rp: 4.162.939.000.00 dengan total nilai produksi yang mampu dihasilkan sebesar Rp: 68.932.660.000.00.

#### **4.3.6 Sektor Perdagangan**

Perkembangan usaha perdagangan menurut jenis kegiatan usahanya setiap Kecamatan berdasarkan pemilikan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) menurut golongan usaha (besar, sedang, dan kecil).

Perdagangan di Kabupaten Pacitan saat ini tidak sebatas pada perdagangan domestik, namun telah menginjak pada perdagangan internasional dengan diekspornya beberapa komoditas daerah, antara lain dari sektor perikanan dan kelautan yakni: Udang Lobster, Layur dan Rumpun laut, Juga beberapa komoditas lainnya seperti batu aji dan jahe gajah. Negara-negara tujuan ekspor meliputi China, Taiwan, Hongkong dan Jepang.

#### **4.3.7 Sektor Pariwisata**

Potensi obyek wisata di Kabupaten Pacitan meliputi wisata alam, wisata sejarah dan wisata budaya dengan jumlah yang cukup banyak. Obyek wisata yang menonjol adalah wisata Goa Gong dan Tabuhan di Kecamatan Punung, Pantai Teleng Ria dan Tamperan di Kecamatan Pacitan, Sumber air panas di kecamatan Arjosari. Sedangkan obyek wisata lainnya masih belum dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke beberapa obyek wisata Kabupaten Pacitan pada tahun 1998/1999 mencapai 384.123 orang, dan pada tahun berikutnya meningkat menjadi 556.642 orang wisatawan. Sedangkan wisatawan asing/mancanegara meningkat dari 317 wisatawan menjadi 704 wisatawan. Dari kondisi tersebut, sektor ini mampu memberikan kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada tahun anggaran 1999/2000 sebesar Rp: 424.352.150.00 (12).

Tabel 4.1.Obyek Wisata Pada Kawasan Pesisir Di kabupaten Pacitan

No	Obyek Wisata	Lokasi	Jarak dari Pusat Kota
1	Pantai Teleng Ria	Kel Sidoharjo. Kec. Pacitan	3 Km
2	Pantai Watu Karung	Ds. Watukarung. Kec. Pringkuku	16 Km
3	Pantai Segoro Anakan, Pantai Taman & Teluk Tawang	Ds. Sidomulyo dan Ds. Hadiwarno, Kec Ngadirojo	56 Km
4	Pantai Tamperan	Kel. Sidoharjo. Kes. Pacitan	5 Km
5	Pantai Srau	Ds. Candi. Kec. Pringkuku	14 Km
6	Pantai Klayar	Ds. Sendang. Kec. Donorojo	49 Km

#### 4.4 Karakteristik Pelayanan Sosial Ekonomi

##### 4.4.1 Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Mengingat Kecamatan Pacitan merupakan pusat Pemerintahan di Kabupaten Pacitan, dengan sendirinya fasilitas-fasilitas Pemerintahan dan fungsi pelayanan umum yang bersifat instansional akan banyak terdapat di Kecamatan pesisir ini. Disamping itu, pada setiap Kecamatan akan terdapat fasilitas kantor Kecamatan yang selain berfungsi administratif juga berfungsi pelayanan umum terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan yang bersangkutan. Hingga secara struktural fungsi-fungsi layanan ini diteruskan di tingkat Kelurahan / Desa.

Pada tiap Kecamatan tersebut juga tersedia fasilitas kantor Kepolisian sektor (Polsek) dan Markas Komando Rayon Militer (Koramil) sebagai fasilitas pelayanan dan pengendalian

Kamtibmas dan korespondensi (Jasa Pos: Surat-menyurat, kiriman paket, warkat dan wesel pos)

#### **4.4.2 Pendidikan**

Keberhasilan pendidikan akan sangat diperlukan oleh ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Untuk Kabupaten Pacitan, khususnya di wilayah perencanaan pada Kecamatan-Kecamatan pesisir tampak masih kurangnya ketersediaan tenaga pendidik (guru) pada tingkat TK dan SD (rata-rata untuk TK tersedia 1-2 orang guru, dan untuk SD tersedia 7-8 orang guru pada tiap sekolah).

#### **4.4.3 Kesehatan**

Pada Kecamatan pesisir di Kabupaten Pacitan, fasilitas kesehatan yang tersedia selain yang disediakan pemerintah juga beberapa tempat pelayanan kesehatan yang dikelola swasta/perorangan yang berijin. Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain:

1. Rumah Sakit	:	1 unit
2. Puskesmas	:	12 unit
3. Puskesmas Pembantu	:	30 unit
4. Praktek dokter	:	30 unit
5. Balai Pengobatan	:	3 unit
6. Posyandu	:	421 unit

Sumber: Kab. Pacitan dalam angka, 2000 (Diolah)

#### **4.4.4 Perdagangan dan Jasa**

Sebagai penggerak perekonomian sektor riil, tersedianya fasilitas fisik untuk kegiatan Perdagangan dan Jasa ini sangat mutlak dan vital. Oleh sebab itu beberapa fasilitas yang langsung terkait dengan sektor ini harus tersedia demi lancarnya roda perekonomian dan terciptanya iklim ekonomi yang kondusif.

#### 4.4.5 Peribadatan

Pada kawasan pesisir Kabupaten Pacitan tercatat beberapa tempat ibadah yang tersedia dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat setempat sebagai berikut:

1. Masjid	:	614 unit
2. Mushola	:	651 unit
3. Gereja	:	2 unit
4. Pura	:	—
5. Vihara	:	—

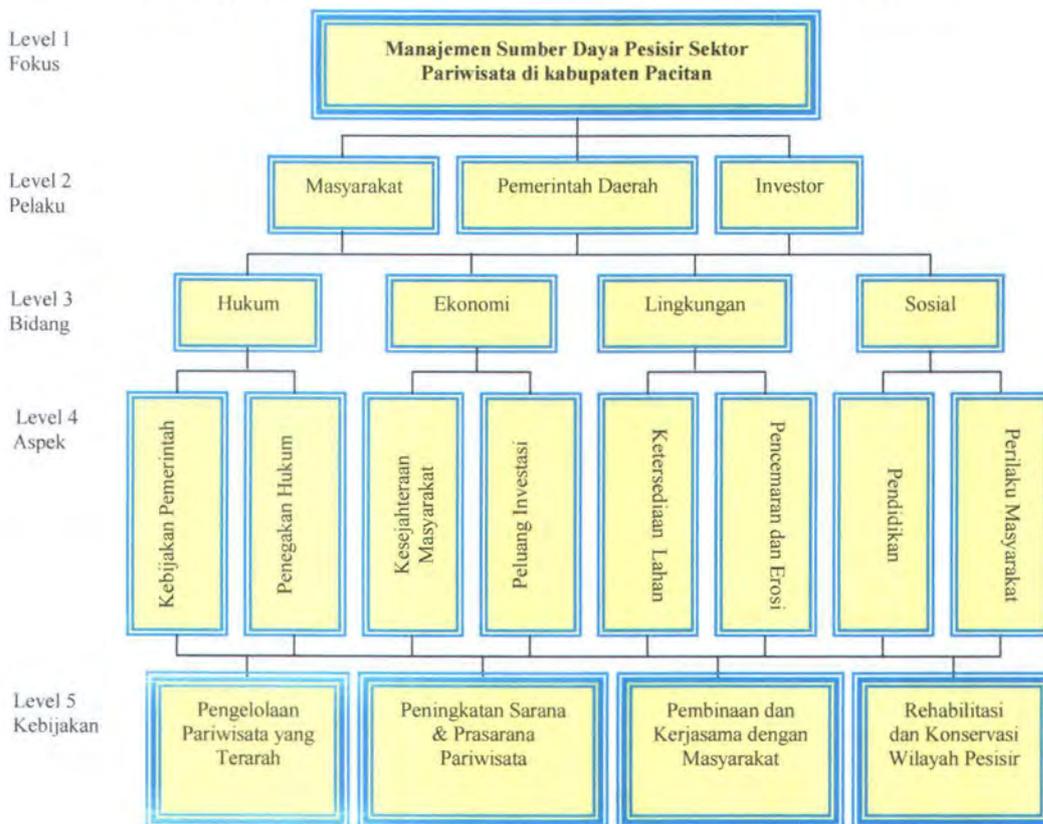
Sumber: Kab. Pacitan dalam angka, 2000 (Diolah)

## BAB V

### ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Prioritas Rencana Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan

Prioritas rencana Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan dilakukan sesuai urutan yang ada dalam model hirarki pada gambar 5.1 berikut ini:



Gambar 5.1 Model Hirarki Rencana Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan

##### 5.1.1 Teknik pengambilan sampel dan Metode pengambilan rata-rata geometrik

Teknik pengambilan sampel sebagai sasaran penyebaran kuisisioner digunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel untuk tujuan tertentu saja. Dengan

menggunakan teknik tersebut diharapkan bisa memperoleh sampel yang representatif yang mengerti tentang pengelolaan (manajemen) sumberdaya pesisir sektor pariwisata di Kabupaten Pacitan.

Banyaknya responden yang telah diambil sebagai sampel dalam rencana Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan adalah sebanyak 30 orang. Proses yang dilakukan setelah pengumpulan kuisioner adalah melakukan pembobotan terhadap hirarki yang ada dalam pertanyaan. Nilai-nilai yang diperoleh dari kuisioner sangat beragam, maka untuk mendapatkan kepastian nilai dilakukan pengambilan rata-rata geometrik. Nilai rata-rata geometri yang didapatkan meliputi semua tingkatan dalam hirarki. Selanjutnya, untuk analisa prioritas Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan digunakan bantuan program *Expert Choice Professional*.

### 5.1.2 Tujuan Rencana Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata

Tujuan yang akan dicapai dalam rencana Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan yaitu untuk mendapatkan kebijakan Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Pantai Teleng Ria Kabupaten Pacitan yang sesuai dengan bidang dan alternatif prioritasnya.

### 5.1.3 Pelaku Pengelolaan

Pada tingkatan ini, nilai perbandingan berpasangan dibuat dengan membandingkan antara beberapa pelaku, yaitu antara masyarakat, Pemerintah Daerah (Pemda) dan Investor (swasta). Nilai rata-rata geometriknnya dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1 Nilai Perbandingan Berpasangan antara Pelaku Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan

No	Pelaku	Nilai Rata-Rata Geometrik
1	Masyarakat-Pemda	(1.3)
2	Masyarakat- Investor	(1.1)
3	Pemda- Investor	2.0

Sumber: hasil pengolahan

Dari nilai perbandingan berpasangan di atas, akan digunakan untuk mencari besarnya nilai *eigenvector* antar pelaku Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Pantai Teleng Ria Kabupaten Pacitan, seperti pada tabel 5.2 berikut ini:

Tabel 5.2 Vektor Prioritas dan *Consistency Ratio* dari Pelaku Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan

No	Pelaku	Vektor Prioritas
1	Masyarakat	0.288
2	Pemda	<b>0.446</b>
3	Investor	0.266
<i>Consistency Index (CI): 0.02</i>		
<i>Random Index (RI): 0.58</i>		
<i>Consistency Ratio (CR): 0.03</i>		

Sumber: hasil pengolahan

Dari tabel 5.2 di atas terlihat bahwa nilai *eigen vector* terbesar terhadap peran pelaku adalah Pemda (0.446) sebagai prioritas utama pelaku Manajemen Sumber Daya Sektor Pariwisata. Kemudian pelaku kedua adalah Masyarakat (0.288). Sedangkan sebagai pelaku ketiga adalah pihak Investor (0.266).

Dengan nilai konsistensi yang dihasilkan sebesar 3% (<10%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan persepsi stakeholder Kabupaten Pacitan untuk Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata menjadi tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah dengan didukung Masyarakat dan Investor(pihak swasta).

Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan mempunyai peran yang sangat penting dan dominan untuk mengelola sumber daya sektor Pariwisata di Pantai Teleng Kabupaten Pacitan dimana dari data yang telah diolah mempunyai nilai prioritas yang tertinggi, disamping itu untuk terlaksananya program yang akan diambil dan direncanakan, Pemerintah Daerah harus bekerja sama secara aktif dengan dua pelaku diantaranya masyarakat dan Investor(pihak swasta), dimana masyarakat mempunyai peran aktif sebagai roda penggerak dalam pelaksanaan program pariwisata serta investor yang memiliki modal dalam pelaksanaan peningkatan pariwisata serta promosi daerah Pantai Teleng Ria Kabupaten Pacitan.

#### 5.1.4 Bidang Rencana Pengelolaan

Sesuai dengan model hirarki pada gambar 5.1, pada tingkatan ini dilakukan uji terhadap beberapa bidang yang digunakan sebagai pertimbangan dalam rencana Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan. Bidang tersebut meliputi: hukum, ekonomi, lingkungan dan sosial. Dengan perolehan nilai dari perbandingan berpasangan, didapatkan rata-rata geometrik yang kemudian digunakan untuk menyusun *eigen vector* (vektor prioritas) seperti pada tabel 5.3 berikut ini:

Tabel 5.3 Vektor Prioritas Kriteria Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan dan *Consistency Ratio*

No.	Bidang	Vektor Prioritas		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Hukum	0.146	0.250	<b>0.333</b>
2	Ekonomi	0.315	0.228	0.233
3	Lingkungan	<b>0.353</b>	<b>0.283</b>	0.253
4	Sosial	0.185	0.239	0.181
<i>Consistency Index (CI)</i>		0.05	0.02	0.06
<i>Random Index (RI)</i>		0.9	0.9	0.9
<i>Consistency Ratio (CR)</i>		0.05	0.02	0.08

Sumber: hasil pengolahan

Dari tabel 5.3 di atas dapat dilihat bahwa nilai *eigenvector* terbesar untuk bidang yang digunakan sebagai pertimbangan dalam rencana Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan dengan pelaku masyarakat dan Pemerintah Daerah adalah pada bidang lingkungan sebesar 0.353 dan 0.283. Sedangkan pada Investor atau swasta, bidang yang menjadi prioritas adalah bidang hukum (0.333). Dari angka *Consistency Index (CI)* dan *Random Index (RI)*, didapatkan *Consistency Ratio (CR)* sebesar 5% untuk Masyarakat, 2% untuk Pemda dan 8% untuk pihak Investor. Ketiga nilai CR tersebut memenuhi persyaratan, yaitu masih di bawah 10%. Faktor lingkungan menjadi prioritas dari Masyarakat dan Pemda, hal ini menunjukkan bahwa dalam Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Pantai Teleng Ria Kabupaten Pacitan juga perlu memperhatikan bidang lingkungan untuk keseimbangan ekosistem wilayah pesisir Pantai Teleng Ria.

### 5.1.5 Aspek Pengelolaan

Tingkatan selanjutnya dari hirarki yang dimodelkan adalah aspek rencana Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan. Aspek-aspek pengelolaan sumber daya pada tingkatan ini berdasarkan pada bidang-bidang sebagai berikut, yaitu: bidang Hukum (Kebijakan Pemerintah, Penegakan Hukum), bidang Ekonomi (Kesejahteraan Masyarakat, Peluang Investasi), bidang Lingkungan (Ketersediaan Lahan, Pencemaran dan Erosi), dan bidang Sosial (Pendidikan, Perilaku Masyarakat ).

Vektor prioritas atau *Eigenvector* dari aspek-aspek Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel 5.4 sebagai berikut:

Tabel 5.4 Vektor Prioritas Aspek Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan dan *Consistency Ratio* Berdasarkan **Bidang Hukum**

No.	Aspek	Vektor Prioritas		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Kebijakan Pemerintah	0.233	0.370	<b>0.667</b>
2	Penegakan Hukum	<b>0.764</b>	<b>0.630</b>	0.333
	<i>Consistency Index (CI)</i>	0.0	0.0	0.0
	<i>Random Index (RI)</i>	0.0	0.0	0.0
	<i>Consistency Ratio (CR)</i>	0.0	0.0	0.0

Sumber: hasil pengolahan

Dari tabel 5.4 di atas diperoleh vektor prioritas aspek pengelolaan berdasarkan perbandingan berpasangan bidang Hukum, dengan vektor prioritas menurut Masyarakat adalah aspek Kebijakan Pemerintah (0.233), kemudian aspek Penegakan Hukum (0.764). Sedangkan vektor prioritas menurut Pemerintah Daerah adalah aspek Kebijakan Pemerintah (0.370), kemudian aspek Penegakan Hukum (0.630). Dan menurut pelaku Investor vektor prioritas adalah Kebijakan Pemerintah (0.667), kemudian aspek Penegakan Hukum (0.333). Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupten Pacitan, perlu diberlakukan peraturan penegakan Hukum atau undang-undang, sehingga pembagian tugas masing-masing *stakeholders* jelas karena untuk aspek Penegakan Hukum, Masyarakat dan Pemerintah Daerah mempunyai nilai prioritas yang tinggi, selain itu Kebijakan Pemerintah merupakan prioritas tertinggi dari investor dimana kebijakan tersebut mempunyai pengaruh yang sangat penting untuk

pembangunan wilayah pesisir Pantai Teleng Ria Kabupaten Pacitan. Nilai Consistency Ratio (CR) yang dihasilkan untuk aspek tersebut adalah sama, yaitu 0%.

Selanjutnya ditinjau dari Bidang Ekonomi, vektor prioritasnya dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut ini:

Tabel 5.5 Vektor Prioritas Aspek Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan dan *Consistency Ratio* Berdasarkan **Bidang Ekonomi**

No.	Aspek	Vektor Prioritas		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Kesejahteraan Masyarakat	<b>0.855</b>	<b>0.796</b>	0.417
2	Peluang Investasi	0.145	0.204	<b>0.583</b>
	<i>Consistency Index (CI)</i>	0.0	0.0	0.0
	<i>Random Index (RI)</i>	0.0	0.0	0.0
	<i>Consistency Ratio (CR)</i>	0.0	0.0	0.0

Sumber: hasil pengolahan

Dari tabel 5.5 di atas diperoleh vektor prioritas aspek pengelolaan berdasarkan perbandingan berpasangan bidang Ekonomi, dengan vektor prioritas menurut Masyarakat adalah aspek Kesejahteraan Masyarakat (0.855), kemudian aspek Peluang Investasi (0.145). Sedangkan vektor prioritas menurut Pemerintah Daerah adalah aspek Kesejahteraan Masyarakat (0.796), kemudian aspek Peluang Investasi (0.204). Dan menurut pelaku Investor vektor prioritas adalah Kesejahteraan Masyarakat (0.417), kemudian aspek Peluang Investasi (0.583). Masyarakat dan Pemerintah Daerah mempunyai nilai prioritas yang sama tinggi untuk aspek Kesejahteraan Masyarakat dimana bahwa aspek tersebut merupakan sesuatu yang sangat vital untuk pertumbuhan perekonomian wilayah pesisir, selain itu Investor mempunyai nilai prioritas tinggi untuk aspek Peluang Investasi dimana aspek tersebut merupakan salah satu dari kriteria investor untuk menanamkan modalnya bagi kemajuan wilayah pesisir Pantai Teleng Kabupaten Pacitan.

Sedangkan untuk kriteria pengelolaan berdasarkan Bidang Lingkungan, dapat dilihat pada tabel 5.6 sebagai berikut:

Tabel 5.6 Vektor Prioritas Aspek Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan dan *Consistency Ratio* Berdasarkan **Bidang Lingkungan**

No.	Aspek	Vektor Prioritas		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Ketersediaan Lahan	<b>0.851</b>	0.435	0.417
2	Pencemaran dan Erosi	0.149	<b>0.565</b>	<b>0.583</b>
	<i>Consistency Index (CI)</i>	0.0	0.0	0.0
	<i>Random Index (RI)</i>	0.0	0.0	0.0
	<i>Consistency Ratio (CR)</i>	0.0	0.0	0.0

Sumber: hasil pengolahan

Dari tabel 5.6 di atas diperoleh vektor prioritas aspek pengelolaan berdasarkan perbandingan berpasangan bidang Lingkungan, dengan vektor prioritas menurut Masyarakat adalah aspek Ketersediaan Lahan (0.851), kemudian aspek Pencemaran dan Erosi (0.149). Sedangkan vektor prioritas menurut Pemerintah Daerah adalah aspek Ketersediaan Lahan (0.435), kemudian aspek Pencemaran dan Erosi (0.565). Dan menurut pelaku Investor vektor prioritas adalah Ketersediaan Lahan (0.417), kemudian aspek Pencemaran dan Erosi (0.583). Investor dan Pemerintah Daerah mempunyai nilai prioritas yang sama tinggi untuk aspek Pencemaran dan Erosi dimana bahwa aspek tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kelestarian ekosistem wilayah pesisir, selain itu Masyarakat mempunyai nilai prioritas tinggi untuk aspek Ketersediaan Lahan dimana aspek tersebut merupakan salah satu kriteria yang paling penting bagi masyarakat, karena untuk melakukan aktifitas dan kegiatan sehari-hari masyarakat memerlukan lahan yang luas dan cukup untuk melakukan aktifitas di wilayah pesisir Pantai Teleng Kabupaten Pacitan, antara lain untuk berjualan, melaut, berkarya dan lain sebagainya.

Berdasarkan bidang sosial, vektor prioritas Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel 5.7 di bawah ini:

Tabel 5.7 Vektor Prioritas Aspek Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan dan *Consistency Ratio* Berdasarkan Bidang Sosial

No.	Aspek	Vektor Prioritas		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Pendidikan	0.370	0.417	0.286
2	Perilaku Masyarakat	<b>0.630</b>	<b>0.583</b>	<b>0.714</b>
	<i>Consistency Index (CI)</i>	0.0	0.0	0.0
	<i>Random Index (RI)</i>	0.0	0.0	0.0
	<i>Consistency Ratio (CR)</i>	0.0	0.0	0.0

Sumber: hasil pengolahan

Dari tabel 5.7 di atas diperoleh vektor prioritas aspek pengelolaan berdasarkan perbandingan berpasangan bidang Sosial, dengan vektor prioritas menurut Masyarakat adalah aspek Pendidikan (0.370), kemudian aspek Perilaku Masyarakat (0.630). Sedangkan vektor prioritas menurut Pemerintah Daerah adalah aspek Pendidikan (0.417), kemudian aspek Perilaku Masyarakat (0.583). Dan menurut pelaku Investor vektor prioritas adalah Pendidikan (0.286), kemudian aspek Perilaku Masyarakat (0.714). Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Investor mempunyai nilai prioritas yang sama tinggi untuk aspek Perilaku Masyarakat, dimana aspek ini tak lepas dari kehidupan masyarakat pesisir pada umumnya, yang dalam kesehariannya tak lepas dari budaya yang beragam, adat istiadat dan religi serta keberagaman etnis.

### 5.1.6 Alternatif Rencana Pengelolaan

Tingkatan selanjutnya dari hirarki yang dimodelkan adalah penentuan alternatif penyelesaian Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan. Untuk vektor prioritas alternatif pengelolaan berdasarkan aspek kebijakan Pemerintah, dapat dilihat pada tabel 5.8 berikut ini:

Tabel 5.8 Vektor Prioritas Alternatif Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan dan *Consistency Ratio* Berdasarkan **Aspek Kebijakan Pemerintah**

No.	Alternatif	Vektor Prioritas		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Pengelolaan pariwisata yang terarah	<b>0.341</b>	0.191	0.152
2	Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	0.167	0.128	0.193
3	Pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat	0.221	0.336	<b>0.398</b>
4	Rehabilitasi dan konservasi pesisir	0.271	<b>0.345</b>	0.257
<i>Consistency Index (CI)</i>		0.04	0.04	0.04
<i>Random Index (RI)</i>		0.9	0.9	0.9
<i>Consistency Ratio (CR)</i>		0.05	0.05	0.05

Sumber: hasil pengolahan

Dari tabel 5.8 di atas, dapat disimpulkan bahwa pada pelaku Masyarakat, alternatif Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan yang menjadi prioritas utama adalah Pengelolaan pariwisata yang terarah (0.341), kemudian Rehabilitasi dan konservasi pesisir (0.271), Pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat (0.221) serta Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (0.167). Sedangkan untuk pelaku Pemda, prioritas utama adalah Rehabilitasi dan konservasi pesisir (0.345), kemudian Pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat (0.336), Pengelolaan pariwisata yang terarah (0.191) serta Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (0.128).. Dan pada pelaku Investor, yang menjadi prioritas utama adalah Pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat (0.398), kemudian Rehabilitasi dan konservasi pesisir (0.257), Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (0.193), serta Pengelolaan pariwisata yang terarah (0.152). Nilai rasio konsistensi dari ketiga pelaku memenuhi syarat yaitu kurang dari 10%.

Selanjutnya vektor prioritas untuk alternatif pengelolaan berdasarkan aspek penegakan hukum adalah pada tabel 5.9 di bawah ini:

Tabel 5.9 Vektor Prioritas Alternatif Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan dan *Consistency Ratio* Berdasarkan Aspek Penegakan Hukum

No.	Alternatif	Vektor Prioritas		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Pengelolaan pariwisata yang terarah	0.151	0.165	0.305
2	Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	0.226	0.130	0.203
3	Pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat	<b>0.349</b>	<b>0.433</b>	<b>0.325</b>
4	Rehabilitasi dan konservasi pesisir	0.275	0.272	0.167
	<i>Consistency Index (CI)</i>	0.04	0.07	0.03
	<i>Random Index (RI)</i>	0.9	0.9	0.9
	<i>Consistency Ratio (CR)</i>	0.04	0.07	0.04

Sumber: hasil pengolahan

Dari tabel 5.9 di atas, dapat disimpulkan bahwa pada pelaku Masyarakat, alternatif Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan yang menjadi prioritas utama adalah Pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat (0.349), kemudian Rehabilitasi dan konservasi pesisir (0.275), Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (0.226) serta Pengelolaan pariwisata yang terarah (0.151). Sedangkan untuk pelaku Pemda, prioritas utama adalah Pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat (0.433), kemudian Rehabilitasi dan konservasi pesisir (0.272), Pengelolaan pariwisata yang terarah (0.165) serta Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (0.130).. Dan pada pelaku Investor, yang menjadi prioritas utama adalah Pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat (0.325), kemudian Pengelolaan pariwisata yang terarah (0.305), Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (0.203), serta Rehabilitasi dan konservasi pesisir (0.167). Nilai rasio konsistensi dari ketiga pelaku memenuhi syarat yaitu kurang dari 10%.



Selanjutnya vektor prioritas untuk alternatif pengelolaan berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat adalah pada tabel 5.10 di bawah ini:

Tabel 5.10 Vektor Prioritas Alternatif Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan dan *Consistency Ratio* Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No.	Alternatif	Vektor Prioritas		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Pengelolaan pariwisata yang terarah	0.157	0.322	0.275
2	Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	0.132	0.110	0.185
3	Pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat	<b>0.435</b>	<b>0.361</b>	<b>0.365</b>
4	Rehabilitasi dan konservasi pesisir	0.277	0.207	0.175
<i>Consistency Index (CI)</i>		0.08	0.03	0.05
<i>Random Index (RI)</i>		0.9	0.9	0.9
<i>Consistency Ratio (CR)</i>		0.09	0.03	0.06

Sumber: hasil pengolahan

Dari tabel 5.10 di atas, dapat disimpulkan bahwa pada pelaku Masyarakat, alternatif Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupten Pacitan yang menjadi prioritas utama adalah Pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat (0.435), kemudian Rehabilitasi dan konservasi pesisir (0.277) , Pengelolaan pariwisata yang terarah ( 0.157) serta Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (0.132). Sedangkan untuk pelaku Pemda, prioritas utama adalah Pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat (0.361), kemudian Pengelolaan pariwisata yang terarah (0.322) , Rehabilitasi dan konservasi pesisir ( 0.207) serta Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (0.110).. Dan pada pelaku Investor, yang menjadi prioritas utama adalah Pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat (0.365), kemudian Pengelolaan pariwisata yang terarah (0.275), Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (0.185), serta Rehabilitasi dan konservasi pesisir (0.175). Nilai rasio konsistensi dari ketiga pelaku memenuhi syarat yaitu kurang dari 10%.

Selanjutnya vektor prioritas untuk alternatif pengelolaan berdasarkan aspek peluang investasi adalah pada tabel 5.11 di bawah ini:

Tabel 5.11 Vektor Prioritas Alternatif Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan dan *Consistency Ratio* Berdasarkan Aspek Peluang Investasi

No.	Alternatif	Vektor Prioritas		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Pengelolaan pariwisata yang terarah	0.214	0.301	0.259
2	Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	0.239	<b>0.327</b>	<b>0.282</b>
3	Pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat	<b>0.391</b>	0.211	0.262
4	Rehabilitasi dan konservasi pesisir	0.156	0.161	0.197
	<i>Consistency Index (CI)</i>	0.03	0.01	0.04
	<i>Random Index (RI)</i>	0.9	0.9	0.9
	<i>Consistency Ratio (CR)</i>	0.03	0.02	0.05

Sumber: hasil pengolahan

Dari tabel 5.11 di atas, dapat disimpulkan bahwa pada pelaku Masyarakat, alternatif Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan yang menjadi prioritas utama adalah Pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat (0.391), kemudian Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (0.239), Pengelolaan pariwisata yang terarah (0.214) serta Rehabilitasi dan konservasi pesisir (0.156). Sedangkan untuk pelaku Pemda, prioritas utama adalah Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (0.327), kemudian Pengelolaan pariwisata yang terarah (0.301), Pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat (0.211) serta Rehabilitasi dan konservasi pesisir (0.131).. Dan pada pelaku Investor, yang menjadi prioritas utama adalah Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (0.282), kemudian Pengelolaan pariwisata yang terarah (0.259), Pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat (0.262), serta Rehabilitasi dan konservasi pesisir (0.197). Nilai rasio konsistensi dari ketiga pelaku memenuhi syarat yaitu kurang dari 10%.

Selanjutnya vektor prioritas untuk alternatif pengelolaan berdasarkan aspek ketersediaan lahan adalah pada tabel 5.12 di bawah ini:

Tabel 5.12 Vektor Prioritas Alternatif Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan dan *Consistency Ratio* Berdasarkan **Aspek Ketersediaan Lahan**

No.	Alternatif	Vektor Prioritas		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Pengelolaan pariwisata yang terarah	<b>0.537</b>	0.309	0.242
2	Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	0.092	0.196	<b>0.288</b>
3	Pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat	0.151	0.114	0.187
4	Rehabilitasi dan konservasi pesisir	0.221	<b>0.382</b>	0.283
	<i>Consistency Index (CI)</i>	0.02	0.02	0.06
	<i>Random Index (RI)</i>	0.9	0.9	0.9
	<i>Consistency Ratio (CR)</i>	0.02	0.02	0.06

Sumber: hasil pengolahan

Dari tabel 5.12 di atas, dapat disimpulkan bahwa pada pelaku Masyarakat, alternatif Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan yang menjadi prioritas utama adalah Pengelolaan pariwisata yang terarah (0.537), kemudian Rehabilitasi dan konservasi pesisir (0.221), Pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat (0.151) serta Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (0.092). Sedangkan untuk pelaku Pemda, prioritas utama adalah Rehabilitasi dan konservasi pesisir (0.382), kemudian Pengelolaan pariwisata yang terarah (0.309), Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (0.196) serta Pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat (0.114).. Dan pada pelaku Investor, yang menjadi prioritas utama adalah Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (0.288), kemudian Rehabilitasi dan konservasi pesisir (0.283), Pengelolaan pariwisata yang terarah (0.242), serta Pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat (0.187). Nilai rasio konsistensi dari ketiga pelaku memenuhi syarat yaitu kurang dari 10%.

Selanjutnya vektor prioritas untuk alternatif pengelolaan berdasarkan aspek pencemaran dan erosi adalah pada tabel 5.13 di bawah ini:

Tabel 5.13 Vektor Prioritas Alternatif Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan dan *Consistency Ratio* Berdasarkan Aspek Pencemaran dan Erosi

No.	Alternatif	Vektor Prioritas		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Pengelolaan pariwisata yang terarah	0.198	0.283	0.266
2	Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	0.117	0.190	0.109
3	Pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat	<b>0.387</b>	0.232	0.139
4	Rehabilitasi dan konservasi pesisir	0.297	<b>0.294</b>	<b>0.485</b>
	<i>Consistency Index (CI)</i>	0.03	0.02	0.02
	<i>Random Index (RI)</i>	0.9	0.9	0.9
	<i>Consistency Ratio (CR)</i>	0.03	0.02	0.02

Sumber: hasil pengolahan

Dari tabel 5.13 di atas, dapat disimpulkan bahwa pada pelaku Masyarakat, alternatif Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan yang menjadi prioritas utama adalah Pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat (0.387), kemudian Rehabilitasi dan konservasi pesisir (0.297), Pengelolaan pariwisata yang terarah ( 0.198) serta Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (0.117). Sedangkan untuk pelaku Pemda, prioritas utama adalah Rehabilitasi dan konservasi pesisir (0.294), kemudian Pengelolaan pariwisata yang terarah (0.283), Pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat ( 0.232) serta Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (0.190).. Dan pada pelaku Investor, yang menjadi prioritas utama adalah Rehabilitasi dan konservasi pesisir (0.485), kemudian Pengelolaan pariwisata yang terarah (0.266), Pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat (0.139), serta Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (0.109). Nilai rasio konsistensi dari ketiga pelaku memenuhi syarat yaitu kurang dari 10%.

Selanjutnya vektor prioritas untuk alternatif pengelolaan berdasarkan aspek pendidikan adalah pada tabel 5.14 di bawah ini:

Tabel 5.14 Vektor Prioritas Alternatif Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan dan *Consistency Ratio* Berdasarkan Aspek Pendidikan

No.	Alternatif	Vektor Prioritas		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Pengelolaan pariwisata yang terarah	0.255	0.214	0.296
2	Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	0.163	0.091	0.207
3	Pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat	<b>0.369</b>	<b>0.518</b>	<b>0.389</b>
4	Rehabilitasi dan konservasi pesisir	0.213	0.178	0.109
	<i>Consistency Index (CI)</i>	0.07	0.06	0.08
	<i>Random Index (RI)</i>	0.9	0.9	0.9
	<i>Consistency Ratio (CR)</i>	0.07	0.07	0.09

Sumber: hasil pengolahan

Dari tabel 5.14 di atas, dapat disimpulkan bahwa pada pelaku Masyarakat, alternatif Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan yang menjadi prioritas utama adalah Pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat (0.369), kemudian Pengelolaan pariwisata yang terarah (0.255), Rehabilitasi dan konservasi pesisir ( 0.213) serta Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (0.163). Sedangkan untuk pelaku Pemda, prioritas utama adalah Pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat (0.518), kemudian Pengelolaan pariwisata yang terarah (0.214), Rehabilitasi dan konservasi pesisir ( 0.178) serta Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (0.091).. Dan pada pelaku Investor, yang menjadi prioritas utama adalah Pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat (0.389), kemudian Pengelolaan pariwisata yang terarah (0.296), Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (0.207), serta Rehabilitasi dan konservasi pesisir (0.109). Nilai rasio konsistensi dari ketiga pelaku memenuhi syarat yaitu kurang dari 10%.

Selanjutnya vektor prioritas untuk alternatif pengelolaan berdasarkan aspek perilaku masyarakat adalah pada tabel 5.15 di bawah ini:

Tabel 5.15 Vektor Prioritas Alternatif Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan dan *Consistency Ratio* Berdasarkan Aspek Perilaku Masyarakat

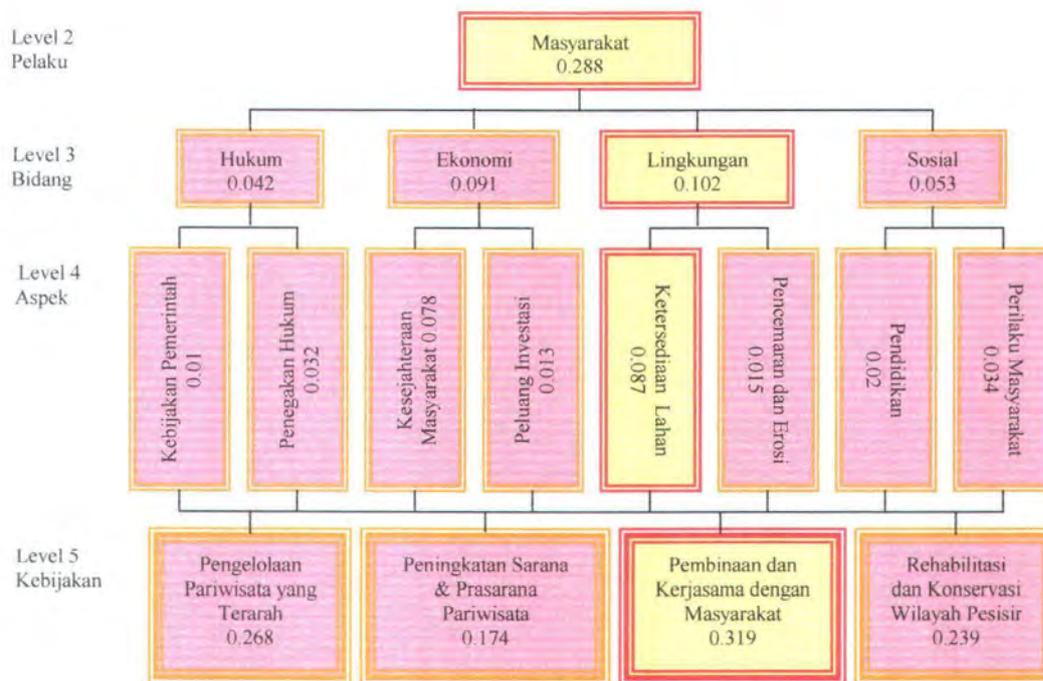
No.	Alternatif	Vektor Prioritas		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Pengelolaan pariwisata yang terarah	0.204	0.241	<b>0.407</b>
2	Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	0.183	0.314	0.218
3	Pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat	<b>0.547</b>	<b>0.339</b>	0.259
4	Rehabilitasi dan konservasi pesisir	0.066	0.106	0.116
	<i>Consistency Index (CI)</i>	0.02	0.08	0.05
	<i>Random Index (RI)</i>	0.9	0.9	0.9
	<i>Consistency Ratio (CR)</i>	0.02	0.09	0.06

Sumber: hasil pengolahan

Dari tabel 5.15 di atas, dapat disimpulkan bahwa pada pelaku Masyarakat, alternatif Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan yang menjadi prioritas utama adalah Pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat (0.547), kemudian Pengelolaan pariwisata yang terarah (0.204), Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (0.183) serta Rehabilitasi dan konservasi pesisir (0.066). Sedangkan untuk pelaku Pemda, prioritas utama adalah Pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat (0.339), kemudian Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (0.314), Pengelolaan pariwisata yang terarah (0.241) serta Rehabilitasi dan konservasi pesisir (0.106).. Dan pada pelaku Investor, yang menjadi prioritas utama adalah Pengelolaan pariwisata yang terarah (0.407), kemudian Pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat (0.259), Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (0.218), serta Rehabilitasi dan konservasi pesisir (0.116). Nilai rasio konsistensi dari ketiga pelaku memenuhi syarat yaitu kurang dari 10%.

### 5.1.7 Penentuan Alternatif Menurut Pelaku Masyarakat

Proses penentuan prioritas rencana Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan menurut Masyarakat, dapat dilihat pada model hirarki (gambar 5.2) berikut ini:

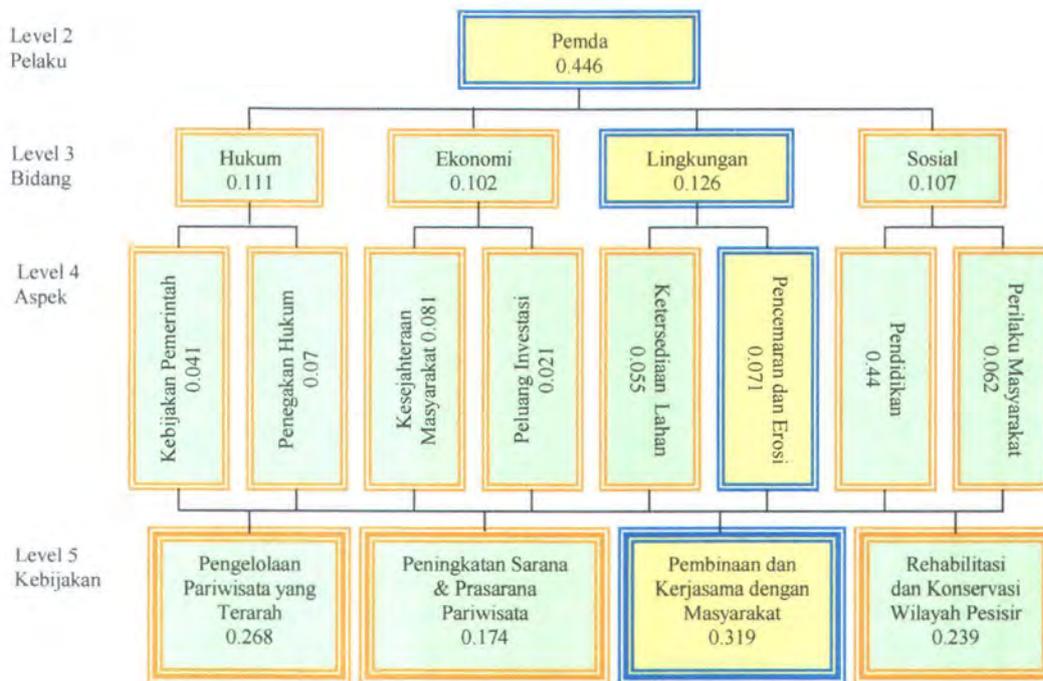


Gambar 5.2 Hirarki Penentuan Alternatif Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan Menurut Pelaku Masyarakat

Dari gambar 5.2 di atas dapat disimpulkan bahwa menurut pelaku Masyarakat dalam Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan adalah bidang Lingkungan (0.102) pada aspek Ketersediaan Lahan (0.087) dengan menghasilkan alternatif Pembinaan dan Kerjasama dengan Masyarakat (0.319). Dengan demikian, masyarakat sebagai pelaku dalam Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan memprioritaskan bahwa dengan adanya ketersediaan lahan yang cukup untuk berusaha dan berkarya, pembinaan serta kerjasama dengan pemerintah maupun investor (swasta), di harapkan adanya kemajuan dari taraf hidup masyarakat wilayah pesisir khususnya masyarakat pantai Teleng Ria Kabupaten Pacitan Jawa Timur.

### 5.1.8 Penentuan Alternatif Menurut Pelaku Pemerintah Daerah

Proses penentuan prioritas rencana Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan menurut Pemda, dapat dilihat pada model hirarki (gambar 5.3) berikut ini:

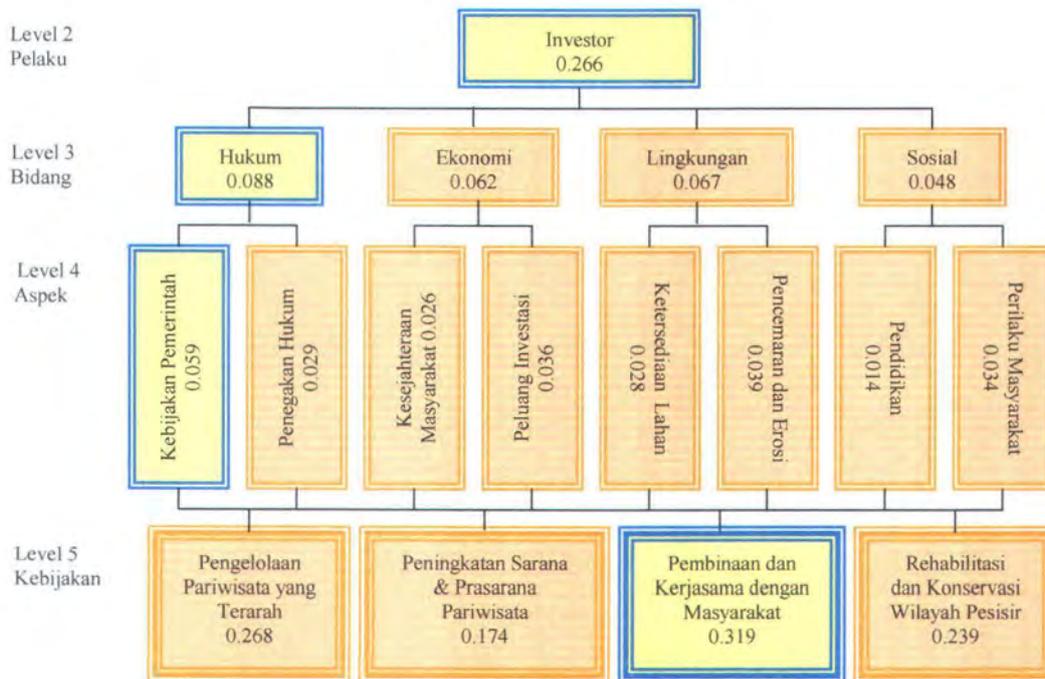


Gambar 5.3 Hirarki Penentuan Alternatif Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan Menurut Pelaku Pemerintah Daerah

Dari gambar 5.3 di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama dalam Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan adalah bidang Lingkungan (0.126) pada aspek Pencemaran dan Erosi (0.071), dengan menghasilkan alternatif Pembinaan dan Kerjasama dengan Masyarakat (0.319). Pemerintah sebagai penyusun kebijakan, harus mempertimbangkan faktor lingkungan antara lain aspek pencemaran dan erosi di wilayah pesisir. Untuk menjaga kelestarian ekosistem, perlu disusun aturan yang jelas tentang pengelolaan pariwisata yang tidak merusak lingkungan.

### 5.1.9 Penentuan Alternatif Menurut Pelaku Investor/Swasta

Proses penentuan prioritas rencana Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan menurut Investor, dapat dilihat pada model hirarki (gambar 5.4) berikut ini:



Gambar 5.4 Hirarki Penentuan Alternatif Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan Menurut Pelaku Investor

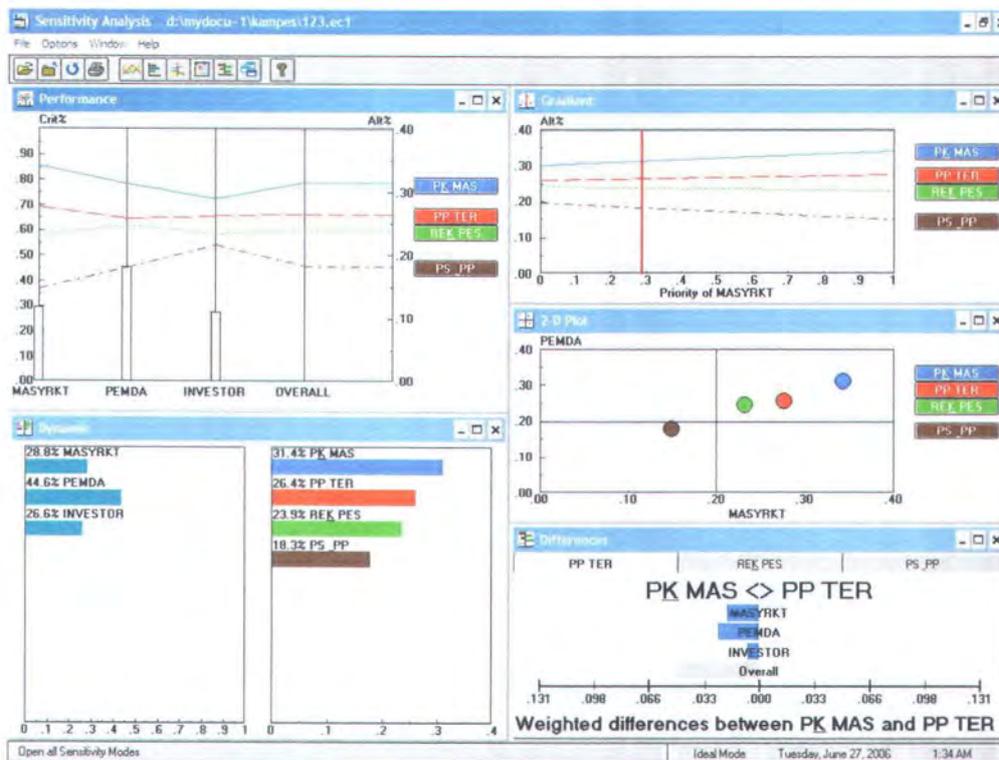
Dari gambar 5.4 di atas dapat disimpulkan bahwa menurut pelaku Investor dalam Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan adalah bidang Hukum (0.088), dengan aspek Kebijakan Pemerintah (0.059) yang menghasilkan alternatif Pembinaan dan Kerjasama dengan Masyarakat (0.319). Berdasarkan kondisi di wilayah pesisir Kabupaten Pacitan yang terletak di daerah selatan pulau Jawa Timur, maka diperlukanlah suatu kebijakan dari pemerintah Daerah yang baik dan terarah, dengan demikian diharapkan dapat menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modalnya, sehingga sumber daya pariwisata yang ada di Kabupaten Pacitan dapat lebih diberdayakan dan dikelola secara profesional, agar tercapai semua itu Pemerintah Daerah haruslah membuat peraturan tentang aturan hukum yang tidak akan merugikan pihak investor

sehingga investor dapat menjalankan usahanya dengan baik dan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat pesisir Pantai Teleng Ria Kabupaten Pacitan.

## 5.2. Analisis Sensitivitas Rencana Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupten Pacitan

Analisis sensitivitas digunakan untuk mengetahui sensitivitas alternatif prioritas (tingkat 5) akibat adanya perubahan pada penilaian pelaku (tingkat 2). Ada beberapa tipe dari analisis sensitivitas, yaitu: *Performance*, *Dynamic*, *Gradient*, *2-D Plot*, dan *Differences*.

Pada gambar 5.5 berikut ini tampilan analisis sensitivitas secara keseluruhan untuk prioritas rencana Alternatif Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan, berdasarkan data hasil penelitian yang telah diolah menggunakan *software Expert Choice*:



Gambar 5.5 Tampilan Analisis Sensitivitas

Proses ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh perubahan nilai suatu kriteria terhadap nilai alternatif-alternatif yang ada, pada analisa sensitivitas dilakukan

beberapa perubahan prioritas untuk melihat dampak dari prioritas yang lain. Perubahan yang digunakan untuk mengetahui prioritas yaitu dengan menambahkan persentase prioritasnya sebesar 5%, 10% dan 15%, dengan penambahan persentase tersebut ternyata tidak mengubah urutan prioritas alternatifnya. Pada penelitian ini dilakukan analisa sensitivitas dilakukan pada pelaku Pemerintah Daerah yang mempunyai bobot prioritas terbesar dari pelaku yaitu 44,6 %.

### 5.3 Pembahasan

Penyusunan model hirarki harus disesuaikan dengan kondisi wilayah yang diteliti, pada metode AHP, yang menjadi bagian penting adalah model hirarki, dalam hal ini adalah Pantai Teleng Ria Kabupaten Pacitan. Sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab permasalahan yang ada di wilayah tersebut.

Tabel 5.16 Jumlah Responden dan Hasil dari Pelaku Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan

No	Pelaku	Jumlah Responden	Hasil Persepsi
1	Masyarakat	13	0.288
2	Pemerintah Daerah	12	0.446
3	Investor	5	0.266
	<b>Total</b>	<b>30</b>	

Sumber: hasil pengolahan

Selain penyusunan model hirarki, pemilihan responden juga mempengaruhi hasil dari metode AHP. Responden yang dimaksud dalam Tugas Akhir ini adalah pelaku Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan, yaitu Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Investor/Swasta. Maka dalam proses pemilihan responden yang representatif, perlu diketahui pengetahuan responden tentang kondisi wilayah pesisir dan potensi di dalamnya. Sehingga hasil yang didapatkan dari metode AHP ini bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan hasil AHP, alternatif prioritas yang lebih diharapkan dari pihak Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Investor adalah Pembinaan dan Kerjasama dengan Masyarakat.

Dalam Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan khususnya di wilayah Pantai Teleng Ria, prioritas tersebut sangat penting untuk mewujudkan suatu pengelolaan pariwisata yang baik, maksud dari prioritas tersebut adalah bahwa dengan adanya suatu pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat, Pemerintah dan Investor dapat lebih mudah dalam melaksanakan program-programnya dengan dukungan masyarakat yang berpendidikan dan mempunyai keahlian dalam bidang pengelolaan pariwisata di Pantai Teleng Ria Kabupaten Pacitan.

Selain prioritas Pembinaan dan Kerjasama dengan Masyarakat, alternatif lain untuk mewujudkan tujuan dari Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan adalah dengan adanya Pengelolaan Pariwisata yang terarah, Rehabilitasi dan Konservasi Pesisir serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata, dengan adanya kebijakan dan program pengelolaan yang didapatkan, diharapkan mampu menjadi sebuah kesepakatan bersama dan dijadikan pedoman dalam mengatur, mengarahkan serta mengendalikan berbagai aktivitas masyarakat dalam upaya pemanfaatan sumberdaya kawasan pesisir secara terpadu (*integrated*) dan lestari. Sehingga sumber daya pesisir akan mampu menunjang kegiatan investasi dan usaha masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*). Sebagai pelaku yang mempunyai prioritas paling dominan dalam Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupten Pacitan, maka Pemerintah Daerah harus dapat lebih aktif untuk memberdayakan, bekerjasama dan mengelola sumber daya yang ada di daerahnya, antara lain dengan masyarakat dan Investor(sebagai pihak swasta).

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sesuai dengan tujuan penulisan, yaitu:

1. Rencana Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan memprioritaskan Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama (*eigenvector* 0.446) dalam pengelolaan sumber daya pariwisata, baik sebagai subyek maupun sebagai obyek pembangunan, sedangkan Masyarakat dan Investor merupakan pelaku selanjutnya dimana mempunyai nilai (*eigenvector* 0.288 dan 0.266).
2. Penentuan Alternatif Menurut Pelaku Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama dalam Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan adalah bidang Lingkungan (0.126) pada aspek Pencemaran dan Erosi (0.071), dan untuk pelaku Masyarakat adalah bidang Lingkungan (0.102) pada aspek Ketersediaan Lahan (0.087), serta untuk pelaku Investor adalah bidang Hukum (0.088), dengan aspek Kebijakan Pemerintah (0.059), ketiga pelaku diatas menghasilkan alternatif yang sama, yaitu Pembinaan dan Kerjasama dengan Masyarakat, dimana mempunyai nilai (*eigenvector* 0.319).
3. Alternatif penyelesaian yang didapatkan dalam rencana Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan ini adalah pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat (dengan *eigenvector* sebesar 0.319), sedangkan untuk alternatif selanjutnya adalah Pengelolaan Pariwisata yang terarah, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata serta Rehabilitasi dan Konservasi Pesisir (dengan *eigenvector* sebesar 0.268, 0.174 dan 0.239)

4. Dari analisa Sensitivitas dengan menggunakan *software Expert Choice*, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan nilai prioritas pada pelaku yang ada, tidak berpengaruh terhadap perubahan nilai prioritas alternatifnya secara signifikan.

## 6.2 Saran

Berdasarkan analisa yang dilakukan, maka dapat disarankan untuk penelitian lebih lanjut antara lain:

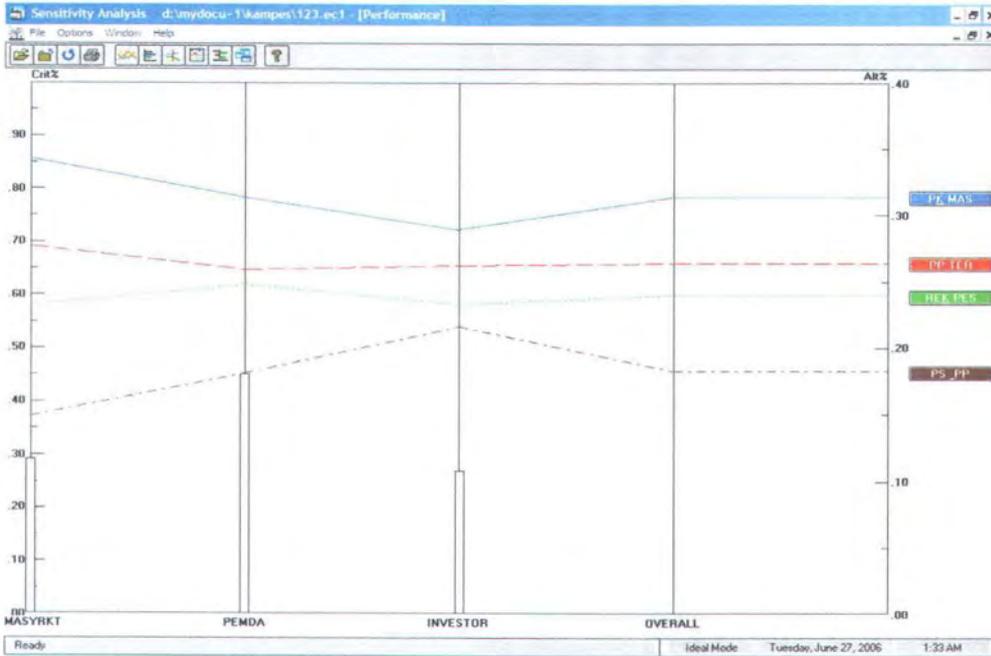
1. Menambahkan unsur-unsur penyusunan hirarki, seperti pelaku, kriteria atau alternatif-alternatifnya dalam program-program strategis pengembangan pariwisata.
2. Mencoba dengan metode baru dalam tahap penilaian pasangan yaitu dengan mengurangi tingkat kepentingan pada pendefinisian elemen, dimana dari sembilan tingkat kepentingan menjadi lima tingkat kepentingan, dengan tujuan agar responden dapat memahami dan menilai suatu kebijakan secara lebih mudah.
3. Pengembangan batasan masalah pada lokasi penelitian, dimana sumber daya pesisir sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Pacitan masih belum banyak dikelola secara baik.
4. Melakukan analisa dinamika sistem terhadap rencana program pengelolaan untuk kemungkinan efek di masa mendatang.
5. Dalam penelitian ini alternatif kebijakan yang diambil masih bersifat global, antara lain untuk alternatif Pengelolaan Pariwisata yang terarah maupun alternatif yang lainnya, maka untuk penelitian selanjutnya alternatif-alternatif tersebut dapat diuraikan lebih spesifik lagi sebagai fokus maupun hirarki rencana dari penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

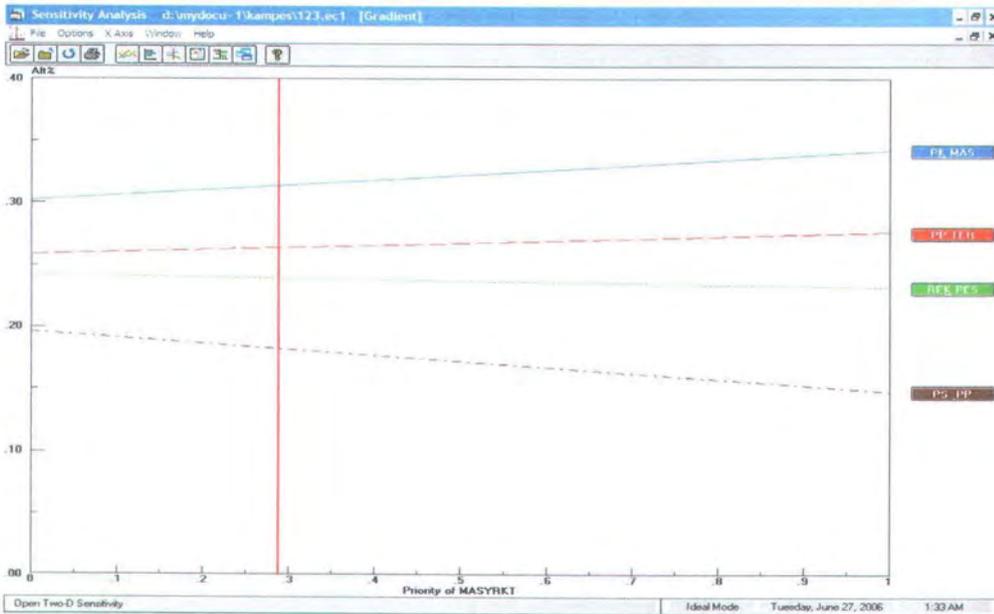
- Akhwadhy, Rudhy. 2002. Studi Rencana Tata Ruang Kawasan Pesisir dengan *Analytic Hierarchy Process*: Studi Kasus Kabupaten Pasuruan. **Tesis Program Pasca Sarjana, Program Studi Teknologi Kelautan. FTK-ITS.** Surabaya. Tidak Dipublikasikan.
- BPS dan BAPPEKAP Pacitan. 2005. **Pacitan Dalam Angka.** Pacitan
- Daftar isian Potensi Kelurahan Sidoharjo 2005. **Wilayah pesisir pantai Teleng Ria.** Pacitan
- Dahuri, dkk. 2001. **Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu.** Pradnya Paramita. Bogor.
- Dahuri, Rochmin, dkk. 2004. **Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu.** Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Daniyati, Rury Firlia. 2005. **Upaya Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Masyarakat di Kabupaten Lumajang.** Tugas Akhir Jurusan Teknik Kelautan. FTK-ITS. Surabaya. Tidak Dipublikasikan.
- Departemen Kelautan dan Perikanan. 2003. **Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir (RUU PWP).** Jakarta.
- Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Pacitan. 2005. **Profil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan.** Pacitan
- Dinas Pariwisata Kabupaten pacitan. 2006. **Peta Panduan wisata Kabupaten Pacitan.** Pacitan
- Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2003. **Laporan Akhir Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Pacitan.** Pacitan
- Latama, dkk. 2002. **Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di Indonesia.** Makalah Falsafah Sains (PPs 702). Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Mamuaya, Gybert E. 2003. Kerangka Survei Penatagunaan Ruang Laut Daerah. **Makalah Falsafah Sains (PPs 702).** Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Meyers, Fred E dan James R. Stewart. 2002. **Motion and Time Study for Lean Manufacturing 3rd Edition.** Prentice-Hall International. London

- Musta'in, M., Arief Suroso, M. Husnul Fauzi. 2004. Implementasi Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Pantai Utara Jakarta. ISSN 1829-6513. **Seminar Nasional Ikatan Sarjana Nahdlatul Utama**, Juni 2004. p: 1-14.
- Mustain, M., DM Rosyid, Masumamah. 2004. Coastal Management Based on the Public Perception For Shoreline Change : Case History in Gresik East Java Indonesia, Proceeding-Maret 2004, **The Fourt Regional Conference on Marine Technology for Enhancing Developing Countries Competitiveness in the Maritime Industry**, 7-8 September 2004, UTM johor Bahru, Malaysia, SII B1-7.
- Noor, Ariadi. 2005. **Analisis Kebijakan Pengembangan Marikultur di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi DKI Jakarta**. Program Pasca Sarjana IPB. <http://www.damandiri.or.id/detail.php?id=286>
- Ruseffendi, E.T. 1994. **Dasar-Dasar Penelitian Pendidikan dan Non Eksakta Lainnya**. IKIP Semarang Press. Semarang.
- Saaty, Thomas L. 1988. **The Analytic Hierarchy Process**. United States of America: Pittsburg university.
- Saaty, Thomas L. 1993. **Pengambil Keputusan Bagi Para Pemimpin**. PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Triatmodjo, Bambang. 1999. **Teknik Pantai**. Beta Offset. Yogyakarta.
- Umamah, Mas. 2003. **Aplikasi Analytic Hierarchy Process untuk Pengelolaan Wilayah Fisik di Pesisir Kabupaten Gresik**. Tugas Akhir Jurusan Teknik Kelautan. FTK-ITS. Surabaya. Tidak Dipublikasikan.
- Web Site Resmi Kabupaten Pacitan 2006. : [WWW.Pacitan.go.id](http://WWW.Pacitan.go.id)
- Wiyana, Adi. 2004. **Faktor Berpengaruh Terhadap Keberlanjutan Pengelolaan Pesisir Terpadu (P2T)**. Makalah Pengantar Falsafah Sains (PPs 702). Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Yuwono, Nur. 1998. **Dasar-Dasar Penyusunan Masterplan Pengelolaan dan Pengamanan Daerah Pantai**. UGM. Yogyakarta.

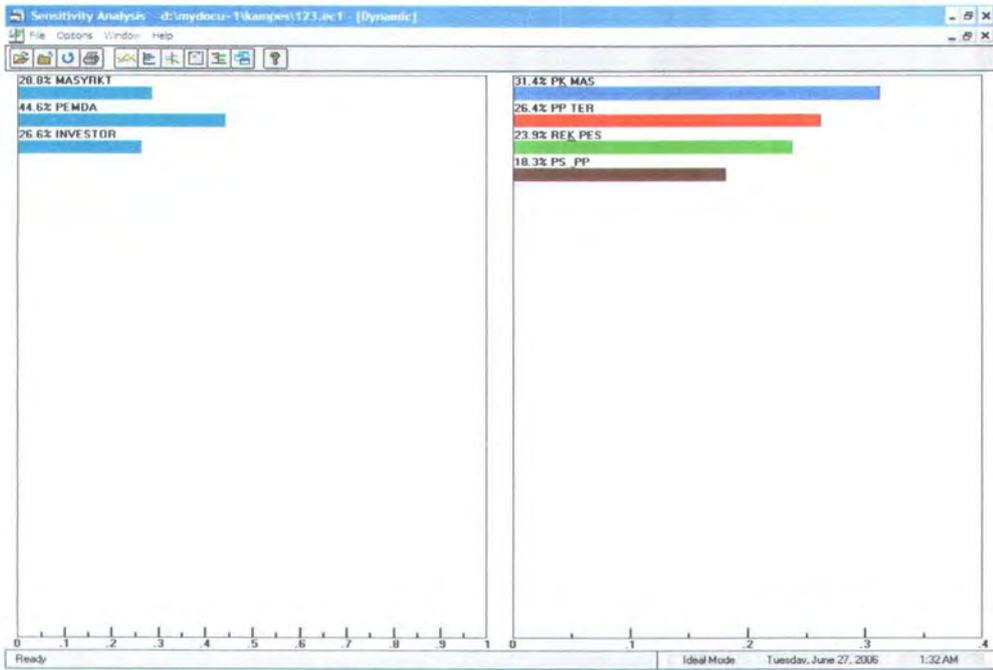
## LAMPIRAN



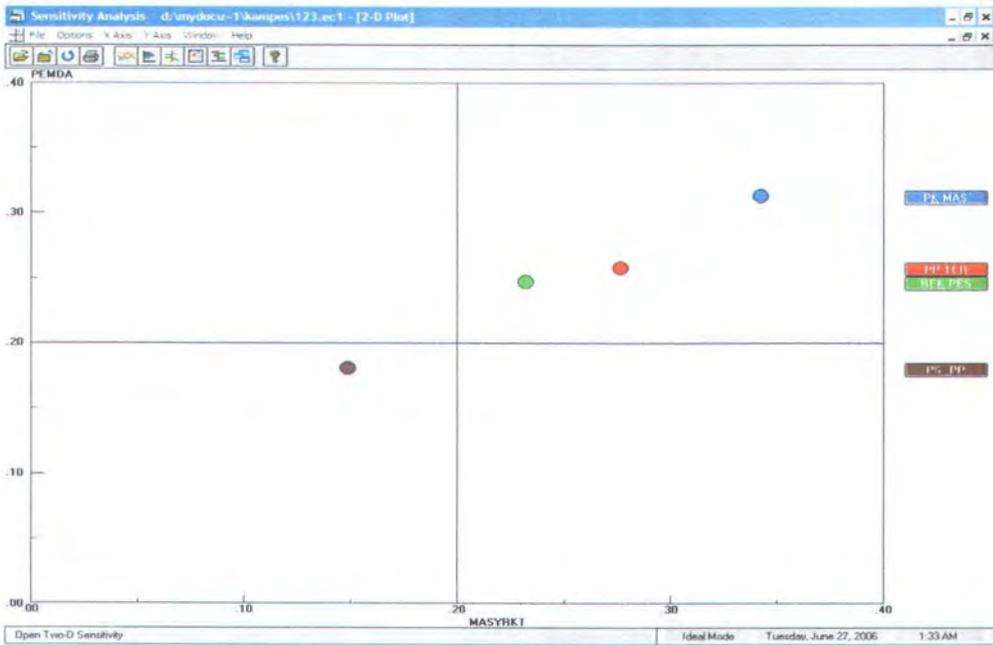
Gambar Grafik Mode Performance Berdasarkan Data Awal



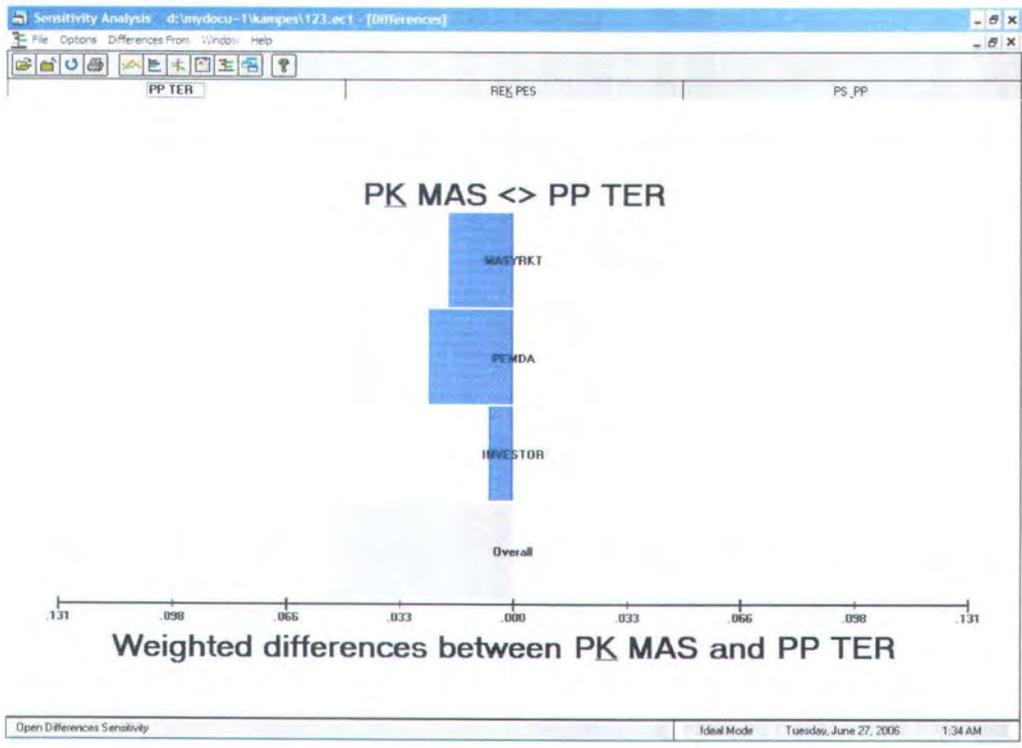
Gambar Grafik Mode Gradient Berdasarkan Data Awal



Gambar Grafik Mode Dynamic Berdasarkan Data Awal



Gambar Grafik Mode 2-D Plot Berdasarkan Data Awal



Gambar Grafik Mode Differences Berdasarkan Data Awal



# Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kab Pacitan

Node: 0

Compare the relative IMPORTANCE with respect to: GOAL

	PEMDA	INVESTOR
MASYRKT	(1,3)	(1,1)
PEMDA		2,0

Row element is \_\_ times more than column element unless enclosed in ()

Abbreviation	Definition
Goal	Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kab Pacitan
MASYRKT	Masyarakat
PEMDA	Pemerintah Daerah
INVESTOR	Investor



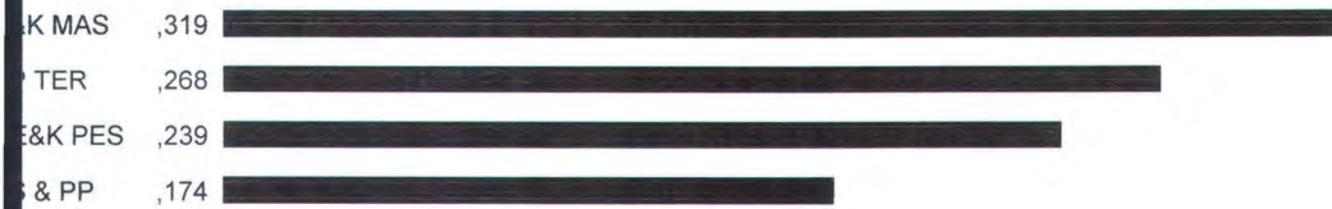
Inconsistency Ratio =0,03

# Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kab Pacitan

## Synthesis of Leaf Nodes with respect to GOAL

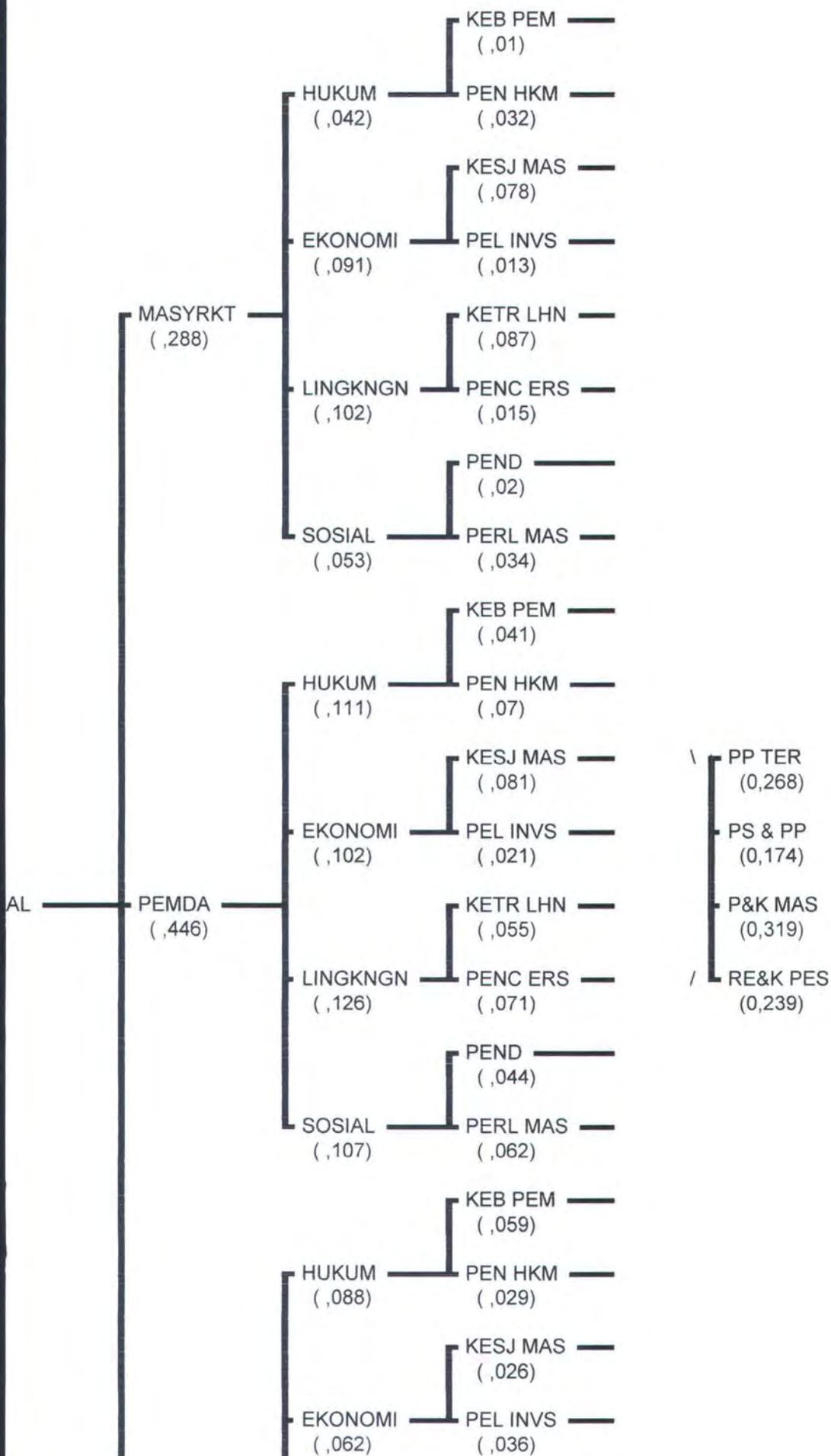
Distributive Mode

OVERALL INCONSISTENCY INDEX = 0,04

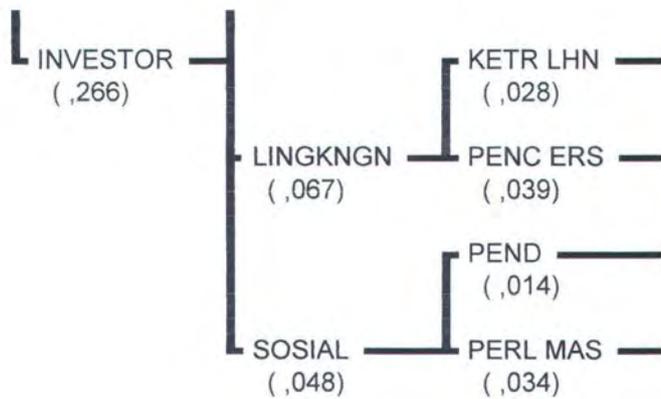


Abbreviation	Definition
P&K MAS	Pembinaan dan Kerjasama dengan Masyarakat
PP TER	Pengelolaan Pariwisata yang Terarah
RE&K PES	Rehabilitasi dan Konservasi Pesisir
PS & PP	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata

# Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kab Pacitan



## Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata di Kab Pacitan



Abbreviation	Definition
GOAL	
EKONOMI	Ekonomi
HUKUM	Hukum
INVESTOR	Investor
KEB PEM	Kebijakan Pemerintah
KESJ MAS	Kesejahteraan Masyarakat
KETR LHN	Ketersediaan Lahan
LINGKNGN	Lingkungan
MASYRKT	Masyarakat
P&K MAS	Pembinaan dan Kerjasama dengan Masyarakat
PEL INVS	Peluang Investasi
PEMDA	Pemerintah Daerah
PEN HKM	Penegakan Hukum
PENC ERS	Pencemaran dan Erosi
PEND	Pendidikan
PERL MAS	Perilaku Masyarakat
PP TER	Pengelolaan Pariwisata yang Terarah
PS & PP	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata
RE&K PES	Rehabilitasi dan Konservasi Pesisir
SOSIAL	Sosial



**ITS**  
Institut  
Teknologi  
Sepuluh Nopember

FAKULTAS TEKNOLOGI KELAUTAN  
JURUSAN TEKNIK KELAUTAN

Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111  
Telp. (031)5928105, 5994251-55 Ext. 1105  
Fex : (031) 5928105  
E-mail : imamr@oe.its.ac.id

**SK TUGAS AKHIR ( LL. 1327 )**

**NO. : 038/K03.4.4/PP/2006**

Mata Kulia : Tugas Akhir  
Kode : LL 1327  
Nama : **Sony Sulistyawan**  
Nomor Pokok : **4301100031**  
Tanggal diberikan : 10 Maret 2006  
Tanggal Selesai : 10 Maret 2007  
Dosen Pembimbing : **Dr. Mahmud Musta'in, MSc.**

THEMA / URAIAN / DATA-DATA YANG DIBERIKAN / JUDUL TUGAS AKHIR :

**“ MANAJEMEN SUMBER DAYA PESISIR SEKTOR PARIWISATA “ STUDI KASUS DI  
KABUPATEN PACITAN PROPINSI JAWA TIMUR “ “**



Surabaya, 29 Maret 2006  
Ketua Jurusan,

**Ir. IMAM ROCHANI, MSc**  
NIP. 131 417 209

Dibuat Rangkap 4 (empat) :

1. Mahasiswa Ybs.
2. Dekan FTK – ITS
3. Dosen Pembimbing
4. Arsip Jurusan.



**ITS**  
Institut  
Teknologi  
Sepuluh Nopember

FAKULTAS TEKNOLOGI KELAUTAN  
JURUSAN TEKNIK KELAUTAN  
Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111  
Telp. : 031 5928105  
Fex : 031 5928105  
E-mail : imamr@oe.its.ac.id

Nomor : 030/KO3.4.4/PP/2006  
Lampiran : -----  
Perihal : Ijin Survei

9 Maret 2006

Kepada : Yth. Kepala Dinas BAKESBANGLIMAS  
Kabupaten Pacitan  
di -  
Pacitan

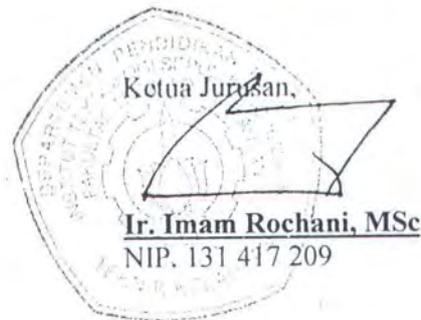
Dengan hormat,

Sehubungan dengan pengerjaan Tugas Akhir bagi Mahasiswa sebagai persyaratan akademik yang berlaku di Jurusan Teknik Kelautan FTK-ITS, maka bersama ini kami mohon agar Mahasiswa kami tersebut dibawah ini dapatnya diberikan kesempatan untuk melakukan survey / pengambilan data di Instansi yang Bapak pimpin pada bulan antara Maret - Juli 2006.

Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Sony Sulistyawan  
NRP. : 4301 100 031  
Judul TA : *Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata " Studi Kasus di Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur "*  
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Mahmud Musta'in, MSc.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan

1. BAPEDA Kabupaten Pacitan
2. Dinas Kelautan & Perikanan Pacitan
3. Dinas Pekerjaan Umum
4. Dinas Pariwisata
5. Dinas Tata Ruang Kota
6. Kecamatan Pacitan
7. Tokoh-tokoh Masyarakat.
8. A r s i p.



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
BADAN KESBANG DAN LINMAS**

Jl. Dr. Wahidin N0.7 A Telp. (0357) 881066

**PACITAN**

---

**SURAT KETERANGAN**

**Untuk Melakukan Survey Penelitian.**

**Nomor : 072/286/1408.45/2006.**

**DASAR :**

1. Undang - Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130 - 67 Tahun 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota .
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kerja Kabupaten Pacitan.
4. Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 137 Tahun 2003 tentang: Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan .
5. Surat : FAKULTAS TEKNOLOGI KELAUTAN SURABAYA  
Nomor : 030 / KO3.4.4 / PP / 2006  
Tanggal : 9 Maret 2006  
Perihal : IJIN SURVEY.

Dengan dasar tersebut diatas dengan ini menyatakan **Tidak Keberatan** untuk di Lakukan Survey Penelitian Atas Nama Penanggung jawab :

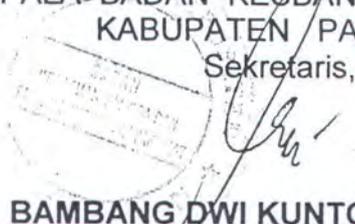
- |                            |                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama                    | : Sony Sulistyawan NRP 4301100031                                                             |
| b. Alamat                  | : Jln. Kampus ITS Sukolilo Surabaya                                                           |
| c. Tema / Reseach / Survey | : " <b>Manajemen Sumberdaya Pesisir Sektor Pariwisata Studi Kasus di Kabupaten Pacitan</b> ". |
| d. Lokasi                  | : Kecamatan Pacitan                                                                           |
| e. Waktu                   | : Tanggal 16 s/d 16 Juli 2006                                                                 |
| f. Pengikut                | : -                                                                                           |

Dengan Ketentuan – Ketentuan sebagai Berikut :

1. Mentaati ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat.
2. Tidak di perkenankan menjalankan kegiatan - kegiatan diluar hal - hal tersebut diatas.
3. Setelah selesai melakukan Survey / Reseach , sebelum meninggalkan Kabupaten Pacitan diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Camat setempat dan Pemerintah Kabupaten Pacitan .
4. Dalam jangka waktu 1 Bulan setelah selesai Survey / Reseach diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil - hasilnya kepada :
  - b. Bupati Pacitan
  - c. Ketua BAPPEDA Kabupaten Pacitan .
  - d. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Pacitan.
  - e. Kepala Dinas / Badan / Kantor terkait
5. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang Surat Keterangan tidak memenuhi ketentuan - ketentuan tersebut diatas.

Pacitan, 16 Maret 2006

An. BUPATI PACITAN  
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS  
KABUPATEN PACITAN.  
Sekretaris,

  
**BAMBANG DWI KUNTO PURNOMO**

Pembina  
NIP. 050 016 153

Tembusan Kepada :

- Yth. Sdr.1. Dandim 0801 Pacitan.  
2. Kapolres Pacitan.  
3. Kepala Bappeda Kab.Pacitan.  
4. Kepala Balitbang Kab.Pacitan.  
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Pacitan  
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Pacitan.  
7. Kepala Dinas Tata Ruang Kota/DKLH.  
Kabupaten Pacitan  
8. Kepala Kantor Arsip Kab.Pacitan  
9. Camat Pacitan  
10. Tokoh – tokoh Masyarakat Kec. Pacitan

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
KECAMATAN PACITAN  
**KANTOR KELURAHAN SIDOHARJO**  
Jalan Letjen Suprpto Nomor : 01 Telepon : (0357) 881598  
PACITAN

SURAT KETERANGAN

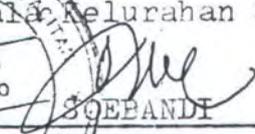
Nomor; 254/60 /418.61/1001/2006

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan menerangkan bahwa ;

1. N a m a : Sony Sulisyawan
2. NRP : 4301100031
3. A l a m a t : Jalan Kampus ITS Sukolilo Surabaya

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan akan mengadakan Survey Penelitian di Kelurahan Khususnya Lingkunag - Teleng mengenai kepariwisataan .

Demikian keterangan ini untuk menjadikan periksa

Sidoharjo, 16 Maret 2006  
Kepala Kelurahan Sidoharjo  
  
SOEBANDI  
NIP: 310 050 723  


## **KUISIONER (AHP)**

Kuisisioner ini disusun untuk kegiatan penulisan Tugas Akhir.

**Manajemen Sumber Daya Pesisir Sektor Pariwisata:  
“Studi Kasus di Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur”**



Oleh.

SONY SULISTYAWAN

NRP: 4301.100.031

**JURUSAN TEKNIK KELAUTAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI KELAUTAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
SURABAYA  
2006**

Kami adalah mahasiswa dari Teknik Kelautan ITS Surabaya, sedang melakukan program penelitian mengenai manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kab. Pacitan Kec. Pacitan. Untuk itu kami mohon kesediaan bapak/ibu memberikan informasi yang kami tanyakan. Kami menjamin kerahasiaan informasi anda dan semoga penelitian ini berguna bagi perbaikan kesejahteraan penduduk di wilayah pesisir Kabupaten Pacitan Kecamatan Pacitan.

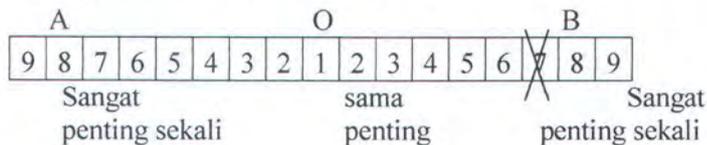
### IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : .....
2. Alamat : .....
3. Telepon : .....
4. Desa : .....
5. RT/RW : .....
6. Kelurahan : .....
7. Kecamatan : .....
8. Jenis kelamin : .....
9. Pekerjaan : .....
10. Instansi : .....
11. Pendidikan : .....
12. Umur : .....

### Model Pertanyaan Persepsi

#### Contoh pertanyaan dan jawaban:

- Untuk mengatasi persoalan di daerah anda, manakah yang lebih penting antara bidang A atau B berikan skor penilaian anda? (skala 1 s/d 9)



#### Keterangan untuk jawaban:

- Jika anda memilih bidang B dengan nilai 7, maka arti jawaban tersebut yaitu bidang B sangat penting untuk dikerjakan lebih dulu daripada bidang A.
- Definisi nilai 1 s/d 9:
 

1	→	→	sama penting
3	→	→	lebih penting
5	→	→	cukup penting
7	→	→	sangat penting
9	→	→	sangat penting sekali

nilai 2, 4, 6, dan 8 merupakan nilai antara dua penilaian tersebut.

**1.1. Pertanyaan mengenai pelaku dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kab. Pacitan Kec. Pacitan.**

1.1.1. Di dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kab. Pacitan, menurut bapak/ibu/saudara, pelaku manakah yang lebih penting?

1111	Masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemda
1112	Masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Investor
1113	Pemda	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Investor

**1.2. Pertanyaan mengenai kriteria/bidang dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kab. Pacitan Kec. Pacitan.**

1.2.1. Di dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kab. Pacitan Kec. Pacitan, dengan sasaran keterlibatan masyarakat, menurut bapak/ibu/saudara, kriteria manakah yang lebih penting?

1211	Hukum	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ekonomi
1212	Hukum	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lingkungan
1213	Hukum	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sosial
1214	Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lingkungan
1215	Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sosial
1216	Lingkungan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sosial

1.2.2. Di dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kab. Pacitan Kec. Pacitan, dengan sasaran keterlibatan pemerintah daerah, menurut bapak/ibu/saudara, kriteria manakah yang lebih penting?

1221	Hukum	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ekonomi
1222	Hukum	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lingkungan
1223	Hukum	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sosial
1224	Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lingkungan
1225	Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sosial
1226	Lingkungan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sosial

1.2.3. Di dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kab. Pacitan Kec. Pacitan, dengan sasaran keterlibatan investor, menurut bapak/ibu/saudara, kriteria manakah yang lebih penting?

1231	Hukum	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ekonomi
1232	Hukum	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lingkungan
1233	Hukum	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sosial
1234	Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lingkungan
1235	Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sosial
1236	Lingkungan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sosial

**1.3. Pertanyaan mengenai aspek dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kab. Pacitan Kec. Pacitan..**

1.3.1. Di dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kab. Pacitan Kec. Pacitan, dengan mempertimbangkan keterlibatan **masyarakat dalam bidang hukum**, menurut bapak/ibu/saudara, aspek manakah yang lebih penting untuk ditangani?

1311	Kebijakan pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penegakan hukum
------	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

1.3.2. Di dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kab. Pacitan Kec. Pacitan, dengan mempertimbangkan keterlibatan **pemerintah daerah dalam bidang hukum**, menurut bapak/ibu/saudara, aspek manakah yang lebih penting untuk ditangani?

1321	Kebijakan pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penegakan hukum
------	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

1.3.3. Di dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kab. Pacitan Kec. Pacitan, dengan mempertimbangkan keterlibatan **investor dalam bidang hukum**, menurut bapak/ibu/saudara, aspek manakah yang lebih penting untuk ditangani?

1331	Kebijakan pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penegakan hukum
------	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

1.3.4. Di dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kab. Pacitan Kec. Pacitan, dengan mempertimbangkan keterlibatan **masyarakat dalam bidang ekonomi**, menurut bapak/ibu/saudara, aspek manakah yang lebih penting untuk ditangani?

1341	Kesejahteraan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peluang investasi
------	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------

1.3.5. Di dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kab. Pacitan Kec. Pacitan, dengan mempertimbangkan keterlibatan **pemerintah daerah dalam bidang ekonomi**, menurut bapak/ibu/saudara, aspek manakah yang lebih penting untuk ditangani?

1351	Kesejahteraan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peluang investasi
------	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------

1.3.6. Di dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kab. Pacitan Kec. Pacitan, dengan mempertimbangkan keterlibatan **investor dalam bidang ekonomi**, menurut bapak/ibu/saudara, aspek manakah yang lebih penting untuk ditangani?

1361	Kesejahteraan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peluang investasi
------	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------

1.3.7. Di dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kab. Pacitan Kec. Pacitan, dengan mempertimbangkan keterlibatan **masyarakat dalam bidang lingkungan**, menurut bapak/ibu/saudara, aspek manakah yang lebih penting untuk ditangani?

1371	Ketersediaan lahan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pencemaran & Erosi
------	--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------

1.3.8. Di dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kab. Pacitan Kec. Pacitan, dengan mempertimbangkan keterlibatan **pemerintah daerah dalam bidang lingkungan**, menurut bapak/ibu/saudara, aspek manakah yang lebih penting untuk ditangani?

1381	Ketersediaan lahan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pencemaran & Erosi
------	--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------

1.3.9. Di dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kab. Pacitan Kec. Pacitan, dengan mempertimbangkan keterlibatan **investor dalam bidang lingkungan**, menurut bapak/ibu/saudara, aspek manakah yang lebih penting untuk ditangani?

1391	Ketersediaan lahan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pencemaran & Erosi
------	--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------

1.3.10. Di dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kab. Pacitan Kec. Pacitan, dengan mempertimbangkan keterlibatan **masyarakat dalam bidang sosial**, menurut bapak/ibu/saudara, aspek manakah yang lebih penting untuk ditangani?

13101	Pendidikan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Perilaku masyarakat
-------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------

1.3.11. Di dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kab. Pacitan Kec. Pacitan, dengan mempertimbangkan keterlibatan **pemerintah daerah dalam bidang sosial**, menurut bapak/ibu/saudara, aspek manakah yang lebih penting untuk ditangani?

13111	Pendidikan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Perilaku masyarakat
-------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------

1.3.12. Di dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kab. Pacitan Kec. Pacitan, dengan mempertimbangkan keterlibatan **investor dalam bidang sosial**, menurut bapak/ibu/saudara, aspek manakah yang lebih penting untuk ditangani?

13121	Pendidikan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Perilaku masyarakat
-------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------

**1.4. Pertanyaan mengenai alternatif dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di kab. Pacitan Kec. Pacitan.**

1.4.1. Di dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kab. Pacitan Kec. Pacitan, dengan mempertimbangkan keterlibatan **masyarakat dalam aspek kebijakan pemerintah**, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk diambil?

1411	Pengelolaan pariwisata yang terarah																		Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata
1412	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat.
1413	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir.
1414	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
1415	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir
1416	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir

1.4.2. Di dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kab. Pacitan Kec. Pacitan, dengan mempertimbangkan keterlibatan **pemda dalam aspek kebijaksanaan pemerintah**, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk diambil?

1421	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata
1422	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat.
1423	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir.
1424	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat

1425	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir
1426	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir

1.4.3. Di dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kab. Pacitan Kec. Pacitan, dengan mempertimbangkan keterlibatan **investor dalam aspek kebijaksanaan pemerintah**, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk diambil?

1431	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata
1432	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat.
1433	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir.
1434	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
1435	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir
1436	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir

1.4.4. Di dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kab. Pacitan Kec. Pacitan, dengan mempertimbangkan keterlibatan **masyarakat dalam aspek penegakan hukum**, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk diambil?

1441	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata
1442	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat.
1443	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir.
1444	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
1445	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir
1446	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir

1.4.5. Di dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kab. Pacitan Kec. Pacitan, dengan mempertimbangkan keterlibatan **pemda dalam aspek penegakan hukum**, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk diambil?

1451	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata
1452	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat.
1453	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir.
1454	Peningkatan sarana &	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama

	Prasarana pariwisata																			dengan masyarakat
1455	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir	
1456	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir	

1.4.6. Di dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kab. Pacitan Kec. Pacitan, dengan mempertimbangkan keterlibatan **investor dalam aspek penegakan hukum**, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk diambil?

1461	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata
1462	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat.
1463	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir.
1464	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
1465	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir
1466	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir

1.4.7. Di dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kab. Pacitan Kec. Pacitan, dengan mempertimbangkan keterlibatan **masyarakat dalam aspek kesejahteraan masyarakat pesisir**, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk diambil?

1471	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata
1472	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat.
1473	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir.
1474	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
1475	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir
1476	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir

1.4.8. Di dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kab. Pacitan Kec. Pacitan, dengan mempertimbangkan keterlibatan **pemda dalam aspek kesejahteraan masyarakat pesisir**, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk diambil?

1481	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata
1482	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat.
1483	Pengelolaan pariwisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi &



14113	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir.
14114	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14115	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir
14116	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir

1.4.12. Di dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kab. Pacitan Kec. Pacitan, dengan mempertimbangkan keterlibatan **investor dalam aspek peluang investasi**, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk diambil?

14121	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata
14122	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat.
14123	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir.
14124	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14125	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir
14126	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir

1.4.13. Di dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kab. Pacitan Kec. Pacitan, dengan mempertimbangkan keterlibatan **masyarakat dalam aspek ketersediaan lahan pesisir**, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk diambil?

14131	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata
14132	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat.
14133	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir.
14134	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14135	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir
14136	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir

1.4.14. Di dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kab. Pacitan Kec. Pacitan, dengan mempertimbangkan keterlibatan **pemda dalam aspek ketersediaan lahan pesisir**, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk diambil?

14141	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata
14142	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat.
14143	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir.
14144	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14145	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir
14146	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir

1.4.15. Di dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kab. Pacitan Kec. Pacitan, dengan mempertimbangkan keterlibatan **investor dalam aspek ketersediaan lahan pesisir**, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk diambil?

14151	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata
14152	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat.
14153	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir.
14154	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14155	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir
14156	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir

1.4.16. Di dalam manajemen sumber daya pesisir sektor pariwisata di Kab. Pacitan Kec. Pacitan, dengan mempertimbangkan keterlibatan **masyarakat dalam aspek proses pencemaran dan erosi**, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk diambil?

14161	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata
14162	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat.
14163	Pengelolaan pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir.
14164	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14165	Peningkatan sarana & Prasarana pariwisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi & konservasi pesisir



